

### BAB III

## PEMANFAATAN RUANG PUBLIK DI KOTA BOGOR TAHUN 1908-1950

### 3.1 Taman dan Ruang Terbuka

Pendirian 's Lands Plantentuin te Buitenzorg bermula dari usulan C. U. L. Kern, seorang profesor ilmu alam dari Belanda yang turut serta dalam rombongan Komisaris Jenderal ke Jawa pada tahun 1815. Tujuan utamanya adalah membangkitkan citra kejayaan Belanda di Hindia melalui promosi penelitian ilmiah. Kern mengajukan usulan pendirian kebun raya sebagai lembaga ilmiah untuk memfasilitasi penelitian botani atas kekayaan flora tropis Hindia Belanda pada 15 April 1817.<sup>48</sup> Usulan ini langsung disetujui dan pada 18 Mei 1817, pembangunan dimulai di atas sebidang tanah yang sebelumnya dianggap liar dan tidak penting, berdekatan dengan taman Gubernur Jenderal di Buitenzorg. Pendirian 's Lands Plantentuin te Buitenzorg ini menjadi bagian dari strategi kolonial Belanda dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah jajahannya. Selain sebagai simbol kebangkitan kembali dominasi kolonial Belanda setelah masa pemerintahan Inggris, kebun raya juga diarahkan untuk menjadi pusat studi ilmiah yang mendukung kepentingan pertanian dan ekonomi kolonial. Sejak awal, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi tanaman, tetapi juga sebagai laboratorium alam yang menopang pengembangan ilmu botani tropis, pertanian, hingga farmasi.

Pendirian 's Lands Plantentuin te Buitenzorg pada 18 Mei 1817 merupakan tonggak penting dalam sejarah ilmiah kolonial Hindia Belanda. Gagasan awal pendirian kebun ini datang dari Prof. Caspar Georg Carl Reinwardt yang melihat perlunya tempat khusus untuk mengoleksi, meneliti, dan mengaklimatisasi

---

<sup>48</sup> Dr. H. H. Zeijlstra Fzn., *Kebun Raya Nasional di Buitenzorg. 1817-18 Mei-1917*, (Indië), diakses melalui Delpher.

tanaman tropis serta tanaman asing yang dibawa ke wilayah jajahan.<sup>49</sup> Lokasi yang dipilih adalah area di sekitar Istana Buitenzorg yang saat itu sudah memiliki lanskap alami dan iklim yang mendukung, sekaligus kedekatannya dengan pusat administrasi kolonial. Dalam dokumen *Indisch Natuuronderzoek* tahun 1905, dilaporkan bahwa kebun ini telah dilengkapi rumah kaca (*kassen*), laboratorium kimia dan botani, hingga jaringan jalan-jalan yang tertata untuk mendukung akses pengunjung dan peneliti.<sup>50</sup> Fasilitas tersebut dibangun bukan hanya sebagai sarana pendukung penelitian, tetapi juga untuk menunjukkan superioritas dan kemajuan teknologi kolonial. Peningkatan infrastruktur ini mencerminkan strategi kolonial dalam “memodernkan” wilayah jajahan demi kepentingan ekonomi dan representasi kekuasaan.

's Lands Plantentuin te Buitenzorg ini merupakan perwujudan dari semangat *imperial science*, kekuasaan kolonial mendirikan lembaga ilmiah untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam jajahannya secara sistematis. Berdasarkan laporan tahunannya, Kebun Raya Bogor mengalami perkembangan besar antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam dokumen *'s Lands Plantentuin te Buitenzorg* karya F.A.F.C. Went (1915), disebutkan bahwa pendirian kebun botani ini bertujuan untuk meneliti serta mengaklimatisasi tanaman-tanaman asing yang dianggap memiliki potensi ekonomi, seperti teh, kopi, kina, dan pala.<sup>51</sup> Kebun ini menjadi laboratorium alam yang melayani kepentingan ekonomi dan ilmiah kolonial. Reinwardt juga melakukan klasifikasi botani secara sistematis terhadap tanaman-tanaman tropis, sebuah pendekatan ilmiah yang memperkuat posisi kebun sebagai pusat studi botani tropis.<sup>52</sup>

Pembangunan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg menjalin kerja sama dengan lembaga botani dunia seperti Kebun Botani Kew di Inggris, Kebun Botani Leiden, hingga jaringan botani di Asia Tenggara dan Pasifik. Pertukaran benih, spesimen herbarium, dan publikasi seperti *Annales du Jardin Botanique de*

---

<sup>49</sup> Reinwardt, C.G.C., *'s Lands Plantentuin te Buitenzorg*, 1817, dalam F.A.F.C. Went, *Overzicht van de geschiedenis der 's Lands Plantentuin te Buitenzorg*, s'Gravenhage: M. Nijhoff, 1915, hlm 5. Diakses melalui Delpher.

<sup>50</sup> *Indisch Natuuronderzoek*, 1905. Delpher, hlm 8

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 11.

*Buitenzorg* menunjukkan bahwa Bogor bukan kebun biasa, melainkan bagian dari sistem pengetahuan botani global yang dikelola dari pusat kekuasaan kolonial.<sup>53</sup> Kegiatan ilmiah ini juga memperkuat posisi Hindia Belanda sebagai wilayah riset tropis penting dalam struktur kolonialisme ilmu pengetahuan, dan menjadikan kebun sebagai sumber daya strategis baik secara ekonomi maupun ilmiah. Namun, fungsi Kebun Raya Bogor tidak hanya terbatas pada aktivitas ilmiah dan ekonomi. Dalam konteks ruang publik, Kebun Raya Bogor memiliki peran yang ambigu namun strategis.



Gambar 3 Gerbang 's Lands Plantentuin, tahun 1900.

Sumber: KITLV 6903

's Lands Plantentuin mengalami perubahan fungsi yang signifikan akibat pengaruh gerakan politik etis dan perkembangan industri pariwisata kolonial pada awal abad ke-20. 's Lands Plantentuin mengalami transformasi dari ruang eksklusif ilmiah menjadi destinasi wisata yang menarik di *Buitenzorg* (Bogor) sebagai bagian dari strategi kolonial untuk mempromosikan citra humanis dan kemajuan peradaban. Gambar 3, yang menggambarkan gerbang tua dikelilingi vegetasi lebat, menjadi saksi bisu perubahan ini dengan menunjukkan batas awal akses yang ketat. Akses terhadap Kebun Raya Bogor pada masa kolonial tidak lagi sepenuhnya tertutup. Promosi 's Lands Plantentuin semakin intens setelah pembentukan *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV) pada tahun 1908, lembaga pariwisata resmi

---

<sup>53</sup> *Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg*, Volume 5, 1890–1920.

Hindia Belanda. VTV menerbitkan brosur seperti *Java the Wonderland* (1910) serta memasarkan 's Lands Plantentuin di pameran internasional, seperti di Roubaix, Prancis, untuk menegaskan narasi keindahan lanskap kolonial.

Laporan Departemen Pertanian Hindia Belanda dalam *Guide to The Botanic Gardens Buitenzorg* sejak tahun 1910, pihak berwenang membuka kawasan ini untuk umum tanpa memungut biaya masuk, dengan gerbang utama di sisi timur laut yang dikelilingi pohon kanari sebagai jalur utama pengunjung.<sup>54</sup> Kebun Raya Bogor ('s Lands Plantentuin) secara resmi dibuka untuk umum sejak tahun 1910 berdasarkan laporan Departemen Pertanian Hindia Belanda, keterbukaan akses ini bersifat selektif dan bersyarat. Dalam praktiknya, akses tersebut hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, terutama masyarakat Eropa, elite pribumi, dan pelajar dari sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Kalangan bumiputra dari kelas sosial bawah tetap menghadapi hambatan struktural yang membatasi mereka untuk turut serta menikmati fasilitas tersebut. Hal ini tercermin dari penataan fisik dan simbolik ruang Kebun Raya yang diatur secara ketat oleh pemerintah kolonial. Gerbang utama yang terletak di timur laut dan dikelilingi vegetasi kanari menjadi batas fisik dan simbolik atas siapa yang berhak memasuki kawasan tersebut. Namun, Gambar 3 menunjukkan bahwa gerbang tersebut membatasi masuknya masyarakat luas ke dalam kompleks Kebun Raya secara ketat pada masa awal untuk menjaga fungsi konservasi dan penelitiannya, mencerminkan kebijakan kolonial yang masih mendominasi hingga 1930. Panduan wisata berbahasa Inggris dan Belanda turut diterbitkan untuk memandu wisatawan mengeksplorasi jalur botani dan memahami koleksi tanaman.

Perkembangan transportasi turut mendukung akses ke Kebun Raya.<sup>55</sup> Jalur kereta api Batavia–Buitenzorg, yang beroperasi sejak 1883, mempermudah perjalanan warga metropolitan. Staatsspoorwegen menyediakan tarif khusus kelas tiga pada akhir 1920, memungkinkan kunjungan rekreasi akhir pekan yang terjangkau dan menjadi bagian dari budaya *naar boven* ke daerah pegunungan sejuk. Meski demikian, jalan setapak berbatu pada Gambar 3 menghambat

---

<sup>54</sup> Dr. J.J. Smith, *Guide to the Botanic Gardens, Buitenzorg*, Hlm 5.

<sup>55</sup> *Illustrated Java the Wonderland*, (1910), Hlm 29.

mobilitas masyarakat umum ke dalam Kebun Raya secara signifikan sebelum perbaikan infrastruktur pada akhir 1930, menegaskan bahwa akses awal lebih menguntungkan kalangan elit.

Profil pengunjung Kebun Raya pada masa itu sangat beragam. Wisatawan asing dari Belanda dan Eropa Barat, bersama penduduk Eropa di Hindia, elite pribumi, dan pelajar sekolah Belanda, mengunjungi kebun ini dengan dukungan fasilitas seperti kedai makanan dan peta rute. Namun, area tertentu seperti rumah kaca dan laboratorium tetap dibatasi aksesnya oleh pemerintah kolonial hanya untuk yang memiliki izin resmi, mencerminkan segregasi ruang berdasarkan status sosial. Selain rekreasi, Kebun Raya juga menjadi simbol status sosial. Kehadiran Raja Chulalongkorn dari Siam, yang mengagumi kebun tersebut, menegaskan reputasinya sebagai taman tropis unggulan di Asia dan alat diplomasi budaya kolonial.<sup>56</sup> Transformasi ini menunjukkan bahwa Kebun Raya Bogor berperan sebagai ruang publik yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan inklusi bertahap dari masa kolonial menuju kemerdekaan. Secara fisik, ia terbuka dan dapat diakses oleh publik, terutama oleh masyarakat Eropa dan elite pribumi, sehingga memenuhi salah satu syarat sebagai ruang publik dalam pengertian klasik. Dalam hal ini, Kebun Raya Bogor justru merupakan ruang yang dibentuk, diatur, dan diawasi oleh pemerintah kolonial. Tata ruangnya yang rapi, sistem klasifikasi tanaman menurut standar Eropa, dan jalur-jalur lanskap yang ditata secara teratur merupakan bentuk dari kontrol kolonial atas alam sekaligus atas tubuh publik yang mengaksesnya. Kebun ini menjadi sarana simbolik untuk menunjukkan superioritas kolonial dalam “menaklukkan” dan “menata” alam tropis yang dianggap liar.

Fungsi kebun ini lebih kompleks, yakni sebagai situs dominasi ekologis dan kultural, tidak sekadar pusat penelitian tanaman. Tanaman seperti kina, kopi, karet, dan teh yang diteliti di Kebun Raya Bogor menjadi tulang punggung ekspor Hindia Belanda. Dalam laporan tahunan disebutkan bagaimana kebun menjadi tempat eksperimen pengujian adaptasi tanaman dari Amerika Latin dan Afrika sebelum diperkenalkan secara luas ke perkebunan Hindia Belanda. Artinya, kebun ini adalah

---

<sup>56</sup> Anisa Wulan Sari, *Daya Tarik Wisata Tropis dalam Kebun Raya Bogor Masa Kolonial Tahun 1908–1942*, hlm 16.

laboratorium ekonomi yang menopang sistem *plantation economy* kolonial, berperan besar dalam memperkuat kapitalisme kolonial berbasis hasil bumi tropis.<sup>57</sup> Pendirian s'Land Plantentuin tidak hanya mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan botani kolonial, tetapi juga merepresentasikan dinamika kuasa atas ruang yang kompleks. Dalam konteks kolonial, kebun ini berfungsi sebagai pusat aklimatisasi dan penelitian tanaman-tanaman tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kopi, teh, kina, dan karet.

Tata ruang yang teratur dan estetis, dengan jalur-jalur botani yang dirancang mengikuti standar Eropa, merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian kolonial terhadap pergerakan pengunjung. Selain itu, kendala transportasi sebelum tahun 1920 serta infrastruktur jalan berbatu di sekitar kawasan kebun turut membatasi akses masyarakat luas. Setelah Staatsspoorwegen menyediakan tarif khusus kelas tiga, perjalanan ke Buitenzorg menjadi lebih terjangkau, meskipun infrastruktur internal Kebun Raya tetap menyulitkan mobilitas kelompok masyarakat yang kurang berdaya secara ekonomi. Di sisi lain, area tertentu seperti rumah kaca dan laboratorium tetap dibatasi aksesnya hanya untuk pihak yang memiliki izin, memperlihatkan eksklusi institusional terhadap ruang-ruang ilmu pengetahuan.

Bentuk eksklusi lain juga hadir dalam aspek bahasa dan representasi. Panduan wisata yang diterbitkan dalam bahasa Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa segmen pengunjung yang diharapkan adalah mereka yang menguasai bahasa kolonial, yang berarti masyarakat lokal non-terdidik tidak memiliki akses terhadap narasi ilmiah dan rekreatif yang dibangun pemerintah kolonial. Kebun Raya pun dijadikan sebagai simbol status sosial dan tempat pertunjukan budaya, sebagaimana tergambar dari kunjungan tokoh-tokoh penting seperti Raja Chulalongkorn dari Siam. Dengan demikian, pengalaman berkunjung ke Kebun Raya tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan fisik, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang mengatur siapa yang layak berada dalam ruang tersebut. Bila dianalisis melalui perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas, Kebun Raya Bogor tidak sepenuhnya

---

<sup>57</sup> Went, F.A.F.C., *'s Lands Plantentuin te Buitenzorg*, 1915, hlm. 25.

memenuhi karakteristik ruang publik sejati. Menurut Habermas, ruang publik seharusnya bersifat inklusif secara universal, menjadi arena di mana semua warga tanpa memandang latar belakang sosial dapat berpartisipasi dalam wacana dan pengalaman bersama. Namun, dalam konteks Kebun Raya Bogor, ruang publik ini terbentuk dalam kerangka kolonial yang eksklusif, dikendalikan melalui mekanisme sosial, politik, dan simbolik. Dengan demikian, keterbukaan yang ada hanya bersifat semu dan tetap menunjang dominasi kolonial atas ruang, ilmu pengetahuan, dan tubuh publik yang mengaksesnya.

Teori penggunaan ruang oleh Edward Relph, Kebun Raya Bogor merupakan contoh ruang yang dibentuk secara sengaja oleh penguasa kolonial untuk menunjukkan kekuasaan dan pengetahuan mereka. Ruang ini memiliki makna khusus, yaitu sebagai simbol kemajuan dan kekuasaan kolonial atas wilayah jajahan. Dengan kata lain, Kebun Raya Bogor adalah ruang yang diciptakan untuk menunjukkan dominasi budaya dan ilmu pengetahuan Eropa di Hindia Belanda. Dengan demikian, Kebun Raya Bogor tidak hanya berperan sebagai pusat penelitian ilmiah, tetapi juga sebagai bentuk penguasaan terhadap ruang alam dan budaya lokal oleh kekuatan kolonial. Ini menunjukkan bahwa ruang seperti kebun raya bisa menjadi tempat berlangsungnya kontrol sosial, ekonomi, dan politik, serta mencerminkan bagaimana kekuasaan kolonial membentuk dan memaknai ruang di tanah jajahan.

Seiring berkembangnya Kota Buitenzorg, pembangunan taman kota lainnya juga dilakukan untuk mendukung visi kota taman (*tuinstad*) kolonial. Salah satunya adalah Taman Kencana yang awalnya dikenal sebagai Van Imhoff Plein dan merupakan salah satu taman kota yang dibangun dalam rangka modernisasi kawasan Buitenzorg (Bogor) pada awal abad ke-20.<sup>58</sup> Pembangunan taman ini tidak lepas dari perluasan wilayah Kota Bogor berdasarkan *Keur van Buitenzorg 1905*, serta didorong oleh rencana pemerintah kolonial Belanda untuk menjadikan Buitenzorg sebagai kota taman (*tuinstad*). Taman ini mulai dibangun sekitar tahun 1917 bersamaan dengan pengembangan permukiman elit di sekitarnya, seperti di

---

<sup>58</sup> Gemeente Buitenzorg, *Verslag van de Gemeente Buitenzorg over het Jaar 1917*, hlm. 24

kawasan Tanah Baru dan Pangrango, yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah dan kalangan Eropa. Perluasan ini dirancang oleh arsitek kota terkenal, Ir. Thomas Karsten, yang mengusung konsep *garden city* dengan penekanan pada integrasi ruang hijau dan permukiman sehat.

Tujuan utamanya adalah menyediakan ruang rekreasi yang estetis dan nyaman bagi penduduk Eropa di Buitenzorg.<sup>59</sup> Selama masa kolonial, Taman Kencana berfungsi sebagai ruang publik semi eksklusif untuk komunitas Eropa. Taman ini menjadi tempat bersosialisasi, berjalan-jalan, berkumpul dan bersantai bersama keluarga banyak dilakukan di taman ini, menjadikannya sebagai ruang interaksi sosial yang eksklusif. Namun demikian, akses terhadap taman ini pada masa kolonial tidak sepenuhnya inklusif, sebab adanya segregasi ruang antara penduduk Eropa dan bumiputera masih terasa kuat dalam struktur spasial kota kolonial. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa kawasan Taman Kencana dikelilingi oleh rumah dinas pejabat tinggi kolonial seperti kepala *Algemeene Secretarie* dan direktur Herbarium Kebun Raya.<sup>60</sup>

Van Imhoff Plein dapat diakses melalui jalur kereta api Batavia–Buitenzorg, yang beroperasi sejak 1883, memungkinkan penumpang kelas satu dan dua, terdiri dari pejabat dan elit Eropa, serta kelas tiga untuk rakyat pribumi, turun di Stasiun Buitenzorg yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi, lalu melanjutkan perjalanan dengan delman atau berjalan kaki. Delman menjadi moda transportasi populer bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk mencapai taman, dengan tarif yang bervariasi sesuai status sosial, sementara warga sekitar sering memilih berjalan kaki mengingat jaraknya yang relatif dekat dari pusat kota. Pejabat kolonial atau elit lokal dengan kereta kuda pribadi dapat langsung menuju taman, meskipun fasilitas parkir informal pada masa itu sangat terbatas. Van Imhoff Plein terbuka untuk umum tanpa biaya masuk, namun aksesnya lebih banyak dinikmati oleh pejabat Belanda, keluarga Eropa, dan elit pribumi seperti priyayi, sedangkan masyarakat

---

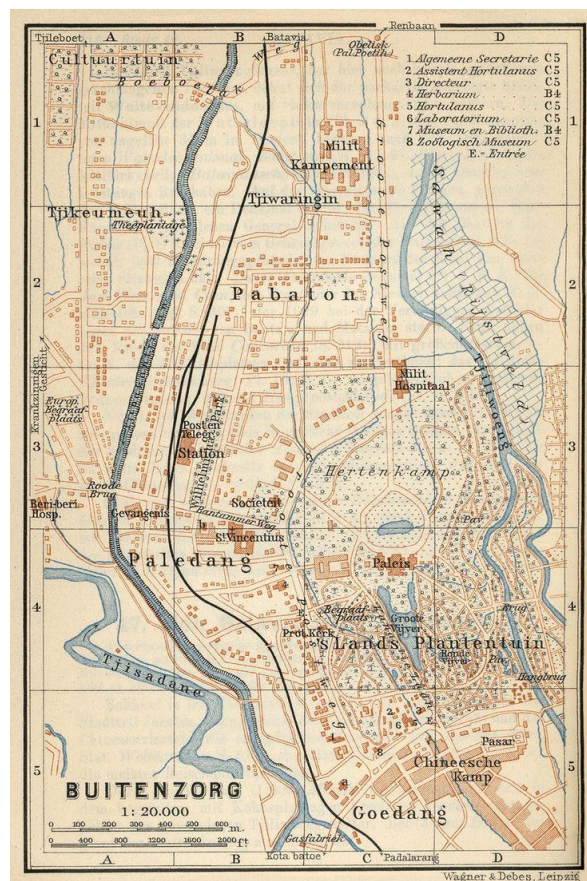
<sup>59</sup> Lusia S. Ratri, "Citra Kawasan Taman Kencana dalam Persepsi Masyarakat terhadap Ruang Kota Kolonial," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK*, Institut Teknologi Bandung, Vol. 32 No. 2 (2021): 125.

<sup>60</sup> Muhammad Rigan Agus Setiawan, *Dari Tanah Partikelir hingga Kota Taman: Perluasan Wilayah Buitenzorg (1917–1942)*, hlm 37.



pribumi biasa hanya diizinkan pada acara khusus atau hari tertentu yang ditentukan otoritas kolonial.

Taman Kencana juga memiliki fungsi simbolik dalam narasi modernitas kolonial. Keberadaannya diapit oleh institusi-institusi penting seperti *Algemeene Proefstation voor den Landbouw* dan *Laboratorium van de Landbouwkundige Dienst* menjadikan taman ini sebagai pusat dari kawasan ilmiah dan administratif di Buitenzorg.<sup>61</sup> Dengan demikian, Taman Kencana tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai bagian dari lanskap kekuasaan yang dirancang untuk mendukung keberlangsungan struktur kolonial melalui estetika ruang kota.



Gambar 4 Peta Van Imhoff Plein Tahun 1914  
Sumber: Delpher

Visualisasi fungsi dan struktur ruang Taman Kencana pada masa kolonial dapat dianalisis melalui peta Buitenzorg. Dalam peta Buitenzorg skala 1:20.000

<sup>61</sup> Gemeente Buitenzorg, *Kaart van Buitenzorg*, 1914

tahun 1914, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Taman Kencana ditunjukkan dengan label “HettenKamp”, yang secara spasial terletak di antara kompleks pemerintahan dan pemukiman elit Eropa seperti *Societeit*, *Post- en Telegraaf-Station*, dan *Militair Hospitaal*. Hal ini menunjukkan bahwa Taman Kencana bukan sekadar taman kota, melainkan bagian integral dari tata ruang kolonial yang berfungsi untuk mendukung kehidupan sosial-ekonomi golongan Eropa di Hindia Belanda. Letaknya yang strategis, dikelilingi oleh institusi penting seperti laboratorium pertanian dan permukiman elit, menjadikan taman ini sebagai bagian integral dari lanskap administratif dan ilmiah di Buitenzorg.

Selain S’Lands Plententuin dan Van Imhoff Plein yang mencerminkan upaya kolonial dalam mengintegrasikan ruang hijau dengan fungsi sosial, ruang publik lainnya yang turut membentuk struktur kota kolonial Buitenzorg adalah Wilhelminapark. Taman ini, yang dibangun untuk menghormati Ratu Wilhelmina, menempati posisi strategis dalam jaringan ruang terbuka kota dan merepresentasikan pola segregasi sosial pada masa Hindia Belanda. Wilhelminapark atau Taman Wilhelmina pada awal abad ke-20, dibangun untuk menghormati Ratu Wilhelmina yang naik takhta pada tahun 1890. Pembangunan taman ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kolonial dalam membentuk ruang publik modern yang mencerminkan estetika dan nilai-nilai Eropa. Wilhelminapark dirancang sebagai taman kota terbuka yang terletak strategis di depan Stasiun Buitenzorg (sekarang Stasiun Bogor), serta berdekatan dengan kantor-kantor pemerintahan kolonial dan rumah Asisten Residen.

Wilhelminapark di Buitenzorg (Bogor) memiliki peran penting sebagai salah satu ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan hiburan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Taman ini tidak hanya digunakan untuk berjalan-jalan atau bersantai, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan pertunjukan musik dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat Eropa di kota tersebut. Salah satu bukti penggunaan taman ini sebagai ruang rekreatif tercermin dalam laporan *Bataviaasch Nieuwsblad* 23 Maret 1916 yang menggambarkan Gubernur Jenderal (G.G.) berkeliling taman selama

pertunjukan musik di Wilhelmina park dengan mylord (kereta ringan) sambil menikmati pertunjukan musik dan penerangan taman.<sup>62</sup>

Secara tata ruang, taman ini ditempatkan sebagai bagian penting dari perencanaan kota kolonial Buitenzorg. Penempatan Wilhelminapark tepat di depan stasiun dan bersebelahan dengan jalan utama menuju Istana Buitenzorg (Istana Kepresidenan saat ini) menunjukkan adanya pengaturan ruang yang menekankan pada sentralisasi fungsi administratif dan simbolik kota. Di sampingnya, berdiri bangunan penting seperti rumah Asisten Residen yang menggambarkan struktur birokrasi kolonial dan memperkuat simbol kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas wilayah tersebut. Keberadaan taman ini menunjukkan diferensiasi sosial yang tegas. Sementara penduduk Eropa memiliki akses leluasa terhadap taman, masyarakat pribumi umumnya tidak memiliki akses atau hanya menjadi pelengkap dalam tata ruang tersebut, seperti petugas kebersihan, penjual kaki lima, atau penonton pasif.

Taman Wilhelmina yang terletak tidak jauh dari Stasiun Buitenzorg merupakan salah satu contoh konkret ruang publik kolonial yang mencerminkan upaya penataan kota bergaya Eropa di Hindia Belanda. Ruang terbuka ini dirancang sebagai pusat rekreasi dan interaksi sosial, khususnya bagi penduduk Eropa dan elite pribumi di kota Buitenzorg. Taman ini dilengkapi dengan elemen-elemen khas taman kota modern pada masanya, seperti jalur pejalan kaki, area tanaman hias, dan bangsal musik (*muziektent*). Salah satu fitur penting dari taman ini adalah penanaman pohon waringin sebagai penanda peringatan penobatan Ratu Wilhelmina pada 31 Agustus 1898. Aksi simbolik ini tidak hanya menunjukkan loyalitas masyarakat lokal terhadap Kerajaan Belanda, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ruang publik dijadikan medium representasi kekuasaan kolonial melalui monumen hidup yang bersifat simbolik.

Keberadaan bangsal musik yang digunakan untuk konser rutin setiap Selasa dan Jumat sore memperkuat fungsi taman ini sebagai sarana hiburan rakyat dan media integrasi sosial. Konser yang diiringi musik batalyon ini bersifat terbuka bagi

---

<sup>62</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, "Tijdens het muziekfeest in den Wilhelminapark te Buitenzorg reed de G.G. met den mylord rond en bezichtigde de verlichting," 23 Maret 1916.

semua kalangan, dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat kota, terutama kalangan muda.<sup>63</sup> Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang publik kolonial tidak hanya berperan dalam aspek estetika dan kesehatan lingkungan kota, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan kultural yang penting. Kehadiran Taman Wilhelmina mencerminkan pola perencanaan kolonial yang memadukan unsur keindahan, kekuasaan, dan kontrol sosial dalam ruang-ruang kota. Meskipun terbuka untuk umum, ruang publik semacam ini tetap menjadi representasi dari struktur sosial kolonial yang mengutamakan kelas atas dan kekuasaan pemerintah kolonial dalam pemanfaatannya.

Pada malam Senin, 8 Oktober 1928 di Wilhelminapark, terdapat Korps Musik Militer mengadakan konser malam yang dipimpin oleh Mr. P. J. B. de Eon, menampilkan rangkaian karya musik klasik dan populer Eropa yang beragam.<sup>64</sup> Konser berlangsung dari pukul 18.30 hingga 20.00, menghadirkan beberapa karya musik yang menonjol, seperti *Nibelungen Marsch* karya E. Wagner yang diaransemen oleh C. Walther, dan pembukaan opera *Peter Schmoll* oleh CM v. Weber. Selain itu, penonton juga dapat menikmati tarian *Walzer* dari J. Strauss berjudul *Tarnend und eine Nacht*, serta aransemen pameran dari opera *Lakmé* oleh L. Delibes yang diolah oleh L. Canivez. Konser tersebut juga menampilkan potpourri dari opera *Rigoletto* karya G. Verdi dan diakhiri dengan lagu mars *Klar zum Gefecht!* oleh H. L. Blankenburg. Program musik yang variatif ini menunjukkan bagaimana taman tersebut menjadi wadah pertukaran budaya dan hiburan yang memperkaya kehidupan masyarakat kolonial Buitenzorg, sekaligus menegaskan peran penting korps musik militer sebagai penjaga tradisi musikal sekaligus penghibur publik.

Taman Wilhelmina tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau dan tempat rekreasi bagi masyarakat Buitenzorg, tetapi juga menjadi lokasi strategis untuk berbagai kegiatan seremonial dan sosial yang penting, salah satunya adalah perayaan ulang tahun Putri Juliana. Pada kesempatan tersebut, bendera nasional

---

<sup>63</sup> J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 2

<sup>64</sup> Program van het concert, " *De locomotief: Samarangsche handels- en advertentie-blad*, 8 Oktober 1928, diakses melalui Delpher.

dikibarkan di taman ini sebagai simbol penghormatan dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat kolonial. Pada sore hari, Taman Wilhelmina menjadi pusat perhatian saat Batalyon Musik menggelar konser terbuka. Konser ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial antarwarga Buitenzorg dan sekitarnya, sekaligus menonjolkan nilai-nilai budaya dan patriotisme kolonial Belanda.

Pada malam harinya dilanjutkan dengan resepsi meriah di Istana, yang menjadi ajang berkumpulnya tokoh-tokoh penting dan masyarakat umum. Puncak acara ditandai dengan dimainkan lagu kebangsaan Wilhelmus pada pukul dua belas malam, diikuti oleh mundurnya Gubernur dan Nyonya van Starckenborgh sebagai tanda penghormatan dan penutupan acara.<sup>65</sup> Perayaan ini menggambarkan bagaimana Taman Wilhelmina tidak hanya berperan sebagai ruang publik fisik, tetapi juga sebagai ruang simbolik yang mencerminkan hubungan antara pemerintahan kolonial dan masyarakat lokal. Acara-acara seperti ini memperkuat legitimasi kekuasaan kolonial sekaligus memberikan ruang interaksi sosial yang penting dalam dinamika kehidupan masyarakat pada masa itu.

Wilhelmina Park pada masa kolonial bersifat selektif dalam hal akses, mencerminkan segregasi sosial yang kuat di Hindia Belanda. Masyarakat Eropa, khususnya warga Belanda dan pejabat kolonial, memiliki akses leluasa ke taman ini untuk kegiatan rekreasi, seperti berjalan-jalan, menikmati konser musik, atau menghadiri perayaan kenegaraan seperti ulang tahun Putri Juliana. Korps Musik Militer, sebagai penyelenggara konser reguler, menjadi pengguna tetap taman, memperkuat peran taman sebagai pusat hiburan elite kolonial. Elite pribumi, seperti priyayi yang memiliki kedekatan dengan administrasi kolonial, juga diizinkan mengunjungi taman pada acara-acara tertentu yang bersifat publik, meskipun dalam kapasitas terbatas. Masyarakat pribumi umum biasanya tidak memiliki akses penuh, melainkan berperan sebagai pelengkap, seperti petugas kebersihan, penjual kaki lima, atau penonton pasif selama acara, dengan akses yang hanya diberikan pada momen khusus di bawah pengawasan ketat. Dengan demikian, meskipun taman ini

---

<sup>65</sup> Bataviaasch Nieuwsblad van Woensdag 1 Mei 1940, diakses melalui Delpher.

secara fisik terbuka, pengunjungnya didominasi oleh kelompok sosial tertentu yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan kolonial.

Jika dilihat dari teori Habermas, Wilhelminapark pada masa kolonial tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ruang publik yang ideal. Walaupun secara fisik merupakan ruang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat, fungsi taman ini lebih mencerminkan representasi kekuasaan kolonial dan segregasi sosial daripada menjadi tempat diskursus terbuka. Taman ini lebih berperan sebagai simbol dominan budaya Eropa dan hierarki sosial kolonial daripada sebagai ruang deliberatif yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam kesetaraan. Akses ke Wilhelminapark terbatas pada kalangan Eropa, sedangkan masyarakat pribumi, meskipun berada di sekitarnya, lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap atau tenaga kerja, bukan sebagai peserta aktif dalam ruang publik tersebut. Oleh karena itu, taman ini lebih bisa dipandang sebagai ruang representasi kekuasaan, yang artinya masyarakat pribumi hanya berada di luar sirkulasi utama ruang tersebut dan tidak dapat terlibat dalam diskursus sosial politik yang berkembang di dalamnya.

Wilhelmina Park di Buitenzorg merupakan salah satu ruang publik kolonial yang penggunaannya tidak sepenuhnya terbuka untuk semua kalangan masyarakat, melainkan bersifat selektif dan merefleksikan struktur sosial pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kelompok yang paling leluasa mengakses taman ini adalah masyarakat Eropa, khususnya warga Belanda dan pejabat kolonial, yang sering memanfaatkannya untuk kegiatan rekreasi, konser musik, hingga perayaan kenegaraan seperti ulang tahun Putri Juliana. Kalangan militer, terutama Korps Musik Militer, juga menjadi pengguna tetap taman ini, menggelar konser yang menjadi hiburan bagi golongan elite kolonial. Meskipun demikian, masyarakat pribumi tertentu, terutama dari kalangan elite lokal atau yang memiliki kedekatan dengan administrasi kolonial, dapat turut mengakses taman ini dalam acara-acara tertentu yang bersifat publik. Pada momen-momen khusus seperti konser terbuka atau resepsi resmi, taman dibuka untuk pengunjung yang lebih luas, termasuk masyarakat non-Eropa, namun akses tersebut tetap berada dalam pengawasan dan kontrol kolonial. Secara fisik, taman ini memiliki sistem akses yang diatur melalui

gerbang atau pintu masuk tertentu yang menandai batas ruang publik kolonial. Gerbang ini berfungsi bukan hanya sebagai pengatur lalu lintas pengunjung, tetapi juga sebagai simbol kontrol atas siapa yang boleh memasuki ruang tersebut. Dengan demikian, meskipun disebut sebagai ruang publik, Wilhelmina Park sejatinya mencerminkan struktur sosial kolonial yang membatasi akses berdasarkan ras, status, dan kepentingan kekuasaan.

Pembangunan ruang terbuka seperti 's Lands Plantentuin, Van Imhoff Plein, dan Wilhelminapark memperlihatkan bahwa pengelolaan ruang kota Buitenzorg pada masa kolonial bukan semata-mata bertujuan menciptakan ruang fisik untuk rekreasi, tetapi juga sebagai strategi politik simbolik yang merefleksikan relasi kuasa kolonial. Dalam konteks ini, ruang publik tidak dapat dimaknai sebagai arena diskursus setara sebagaimana diidealkan oleh Habermas, melainkan sebagai ruang representasi kekuasaan yang mempertahankan segregasi sosial. Jika dianalisis melalui teori penggunaan ruang dari Edward Relph, taman-taman ini merupakan bentuk ruang yang dimaknai secara intensional untuk menegaskan identitas kolonial dan mendukung struktur hierarki sosial-politik. Pengaturan, estetika, dan aksesibilitas ruang dibentuk secara sadar untuk menciptakan keterikatan simbolik antara kekuasaan kolonial dan ruang kota, sehingga menjadikan ruang-ruang terbuka ini sebagai ekspresi dominasi budaya dan politik di tanah jajahan.

### **3.2 Fasilitas Transportasi**

Sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur kolonial, Stasiun Buitenzorg menjadi salah satu fasilitas transportasi utama yang berperan penting dalam mobilitas ekonomi dan sosial di Hindia Belanda. Pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem transportasi yang mampu mengakomodasi pengangkutan hasil bumi, barang dagangan, dan mobilitas manusia dalam skala besar. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa sistem transportasi darat tradisional tidak lagi memadai untuk menopang aktivitas ekonomi yang berkembang pesat. Pembangunan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg dimulai sebagai bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat infrastruktur transportasi di Hindia Belanda, khususnya guna mendukung kepentingan ekonomi dan administratif. Inisiatif ini muncul pada pertengahan abad

ke-19, setelah Jalan Postweg (*De Groote Postweg*) yang dibangun oleh Herman Willem Daendels pada 1808-1811 dianggap tidak lagi cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang semakin meningkat, terutama dengan berkembangnya perkebunan dan aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, Belanda mulai membangun jaringan rel kereta api di Pulau Jawa sebagai upaya modernisasi infrastruktur dan penguatan kontrol kolonial pada pertengahan abad ke-19.<sup>66</sup>

Pemerintah kolonial mulai menyadari perlunya sistem transportasi yang lebih cepat dan andal dibandingkan jalan raya yang sering rusak akibat hujan dan banjir pada tahun 1840. Buitenzorg, sebagai pusat peristirahatan elit kolonial dan lokasi penting seperti Istana Bogor serta Kebun Raya, menjadi destinasi strategis yang perlu dihubungkan dengan Batavia, pusat administrasi dan perdagangan. Selain itu, kebutuhan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti kopi, teh, dan kina dari Priangan (termasuk Buitenzorg) ke pelabuhan Batavia untuk diekspor menjadi pendorong utama.<sup>67</sup> Ide pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda pertama kali diusulkan oleh Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen (1845-1851), yang melihat potensi kereta api berdasarkan keberhasilan teknologi ini di Eropa. Namun, rencana konkret baru terwujud pada masa Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud (1856-1861). Pemerintah kolonial memberikan konsesi kepada *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM), sebuah perusahaan swasta Belanda, untuk membangun jalur kereta api pertama di Jawa pada tahun 1862.<sup>68</sup> Jalur Batavia-Buitenzorg dipilih sebagai proyek perintis karena jaraknya yang relatif pendek (sekitar 60 kilometer) dan pentingnya rute tersebut. Survei awal dilakukan pada 1863, dengan fokus pada jalur yang melewati daerah datar seperti Meester Cornelis (Jatinegara) dan Depok untuk meminimalkan biaya konstruksi. Pembangunan dimulai pada 1869, melibatkan tenaga kerja lokal dalam sistem kerja wajib, serupa dengan pembangunan Jalan Postweg sebelumnya. Jalur ini

---

<sup>66</sup> *Nederlandsch Indië: Staatsspoor- en Tramwegen*. Den Haag: Landsdrukkerij, hlm 5

<sup>67</sup> *Nederlands Tropisch: Veertiendaagsch Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis Omtrent Nederlands Oost- en West-Indië*, jrg. 4, no. 26 (18 April 1932), hlm 405.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 406



menggunakan rel dengan lebar 1.067 mm (lebar standar kolonial) dan dirancang untuk mengangkut penumpang serta barang.<sup>69</sup>

Perjalanan kereta cepat pertama ini bermula dari Stasiun Koningsplein di Batavia, dengan pemberhentian di Maos sebagai tempat menginap, dan berakhir di Surabaya. Jalur ini melintasi daerah pegunungan Preanger yang berbukit dan curam, terutama antara Buitenzorg dan Palabuan. Kondisi ini menuntut penggunaan lokomotif tambahan (kuda kedua) di beberapa titik, sehingga biaya operasionalnya pun tinggi.<sup>70</sup> Posisi geografis Buitenzorg yang berada di antara wilayah pesisir (Batavia) dan pegunungan Priangan menjadikannya lokasi yang strategis dalam perencanaan jaringan rel. Selain itu, Buitenzorg merupakan kediaman resmi Gubernur Jenderal sehingga kebutuhan akan moda transportasi modern menjadi lebih mendesak.<sup>71</sup> Pada masa awal operasional, bangunan stasiun masih sederhana, namun seiring meningkatnya kebutuhan transportasi, fasilitas dan infrastruktur stasiun ditingkatkan.<sup>72</sup> Sebagai titik awal jalur ke arah timur Jawa, stasiun ini terhubung dengan jalur menuju Sukabumi dan Bandung, serta menjadi bagian dari jaringan penting yang menghubungkan berbagai wilayah produksi pertanian dan perkebunan dengan pelabuhan utama di Batavia dan Surabaya.

Stasiun Buitenzorg memainkan peran vital dalam mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial. Di sektor ekonomi, stasiun ini menjadi pusat distribusi komoditas penting seperti kopi, teh, dan karet dari Priangan Barat. Selain itu, stasiun ini melayani perjalanan pejabat kolonial, penduduk Eropa, dan pribumi kelas menengah yang meningkat mobilitasnya pada akhir abad ke-19. Pada tahun-tahun selanjutnya, lalu lintas kereta api di Pulau Jawa meningkat signifikan. Untuk merespons beban jalur utama yang berat, jalur alternatif Batavia–Bekasi yang telah dibuka pada 1887 diperpanjang hingga Karawang pada 1906, dan kemudian ke Padalarang. Jalur ini membentuk Jalur Utama Kedua antara Batavia dan Surabaya. Pada tahun 1909, jalur ini memungkinkan koneksi cepat Batavia–Yogyakarta,

---

<sup>69</sup> *Nederlands Tropisch: Veertiendaagsch Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis Omtrent Nederlands Oost- en West-Indië*, jrg. 4, no. 26 (18 April 1932), hlm 407

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 6

<sup>71</sup> Fasseur, C. (1992). *Indonesia dan Kolonialisme*. Jakarta: Gramedia.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 4

dengan Stasiun Kemajoran menjadi titik keberangkatan baru menggantikan Koningsplein.<sup>73</sup> Stasiun Maos sebagai titik transit mulai kehilangan perannya, sementara Koningsplein bertransformasi menjadi stasiun utama Batavia.<sup>74</sup> Perubahan ini berdampak pula pada status Stasiun Buitenzorg, yang tetap menjadi simpul penting tetapi mengalami penyesuaian dalam rute perjalanan dan distribusi barang pada tahun 1909.

Peningkatan kebutuhan akan transportasi kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, menuntut adanya modernisasi dan pengaturan ulang jalur. Untuk memenuhi tuntutan ini, diperlukan jalur ganda serta pembangunan rel di level tanah yang tidak mengganggu jalur lalu lintas lain, seperti yang dilakukan dari Stasiun Meester Cornelis melalui Kramat dan Pasar Senen ke Kemajoran.<sup>75</sup> Upaya perbaikan ini tidak lepas dari hambatan struktural. Salah satunya adalah penguasaan jalur oleh perusahaan swasta seperti NIS, yang dinilai kurang efisien dan tidak mampu memenuhi standar modernisasi. Oleh karena itu, dilakukan pengambilalihan paksa terhadap jalur-jalur NIS oleh pemerintah kolonial. Pengambilalihan ini dipimpin oleh Kepala Inspektur Staatsspoorwegen (SS), v. Stipriaan Luisius, yang berperan penting dalam nasionalisasi dan perombakan sistem perkeretaapian di Jawa pada tahun 1913.<sup>76</sup> Sejak pengambilalihan tersebut, jalur Batavia–Buitenzorg tidak lagi menjadi hambatan dan perbaikan jalur dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. Perbaikan infrastruktur dan pengelolaan ini menjadikan stasiun seperti Buitenzorg tetap relevan dalam sistem transportasi, meskipun posisinya berubah seiring restrukturisasi jaringan utama Pulau Jawa.

Kerangka pemikiran Habermas, stasiun ini merupakan ruang publik yang secara fisik terbuka, namun secara sosial terbatas, karena akses dan penggunaannya lebih diarahkan untuk melayani kepentingan kolonial, terutama kaum Eropa dan pegawai pemerintah. Dengan demikian, Stasiun Bogor mencerminkan ruang publik yang dikendalikan oleh kekuasaan, bukan sebagai arena diskursus bebas

---

<sup>73</sup> *Nederlands Tropisch: Veertiendaagsch Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis Omtrent Nederlands Oost- en West-Indië*, jrg. 4, no. 26 (18 April 1932), hlm 6.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 6

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 5

sebagaimana yang diidealkan Habermas. Sementara itu, menurut Edward Relph, Stasiun Bogor pada awalnya dapat dikategorikan sebagai ruang yang bersifat *placeless*, karena dibangun dan difungsikan tanpa mempertimbangkan makna lokal bagi masyarakat pribumi. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial politik pasca kolonial, stasiun ini mengalami transformasi makna, yaitu tidak hanya menjadi simpul transportasi, tetapi juga tempat dengan identitas kultural dan nilai historis bagi masyarakat Bogor. Penggunaan dan keterikatan masyarakat terhadap bangunan tersebut menunjukkan pergeseran dari ruang yang asing menjadi ruang yang bermakna, sebagaimana dijelaskan oleh Relph dalam konsep *place*.

### 3.3 Ruang Sosial

Kehidupan sosial kalangan elit Eropa di Buitenzorg turut membentuk karakter ruang publik pada masa kolonial. Salah satu wujud dari pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan sosial adalah didirikannya gedung Societeit te Buitenzorg. Societeit te Buitenzorg yang kini dikenal sebagai Balai Kota Bogor merupakan salah satu fasilitas sosial yang eksklusif untuk kalangan elit Eropa yang bermukim di Hindia Belanda dibangun pada tahun 1886. Istilah "Societeit" dalam bahasa Belanda berarti klub, dan tempat ini menjadi pusat pertemuan bagi masyarakat kolonial untuk bersosialisasi dan mengadakan berbagai acara sosial. Bangunan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ruang sosial bagi masyarakat kolonial. Menurut *Bataviaasch Nieuwsblad* tanggal 6 Maret 1941, gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan sosial, tetapi juga sebagai ruang hiburan, dan berbagai acara seperti konser, pertunjukan teater, dan pesta dansa diselenggarakan.<sup>77</sup>

Societeit yang umumnya hanya diakses oleh kalangan elite Eropa dan pejabat tinggi, dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan sosial, hiburan, dan interaksi dalam lingkungan terkontrol. Bangunan ini tidak hanya memiliki arsitektur yang menarik, tetapi juga dikelilingi taman yang difungsikan sebagai tempat pertunjukan musik militer dua kali seminggu. Kegiatan rutin seperti konser musik yang diiringi oleh batalyon militer setiap Rabu sore dan Sabtu malam

---

<sup>77</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, 6 Maret 1941, "Sociëteit Buitenzorg,"

menjadi bagian dari strategi kolonial dalam menciptakan hiburan yang teratur dan terkendali. Selain itu, pertunjukan teater dan musik yang diadakan oleh Perhimpunan Teater dan Musik Buitenzorg (*Buitenzorgsche Tooneel- en Muziekvereeniging*) menambah semarak aktivitas budaya di ruang ini, dan sering kali disaksikan langsung oleh Gubernur Jenderal dan keluarganya.<sup>78</sup> Hal ini memperkuat status Societeit sebagai ruang publik eksklusif yang mencerminkan hierarki sosial kolonial. Meskipun terbatas untuk kalangan tertentu, adanya sistem “introduksi” memungkinkan tamu luar atau penduduk dari luar radius 20 pal ( $\pm 30$  km) untuk mengakses Societeit dalam waktu terbatas, menunjukkan adanya pengaturan yang ketat terhadap siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas sosial ini. Dengan demikian, Societeit berfungsi tidak hanya sebagai pusat hiburan dan budaya, tetapi juga sebagai simbol stratifikasi sosial dan kontrol kolonial dalam ruang perkotaan Buitenzorg.



Gambar 5 Eksterior Societeit te Buitenzorg, Tahun 1911  
Sumber: Delpher

Berdasarkan gambar di atas, gedung ini merupakan tempat pertunjukan dan pertemuan elite kolonial, termasuk pertunjukan seniman kabaret seperti Louis

---

<sup>78</sup> J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 120

Dauids, Pisuisse, dan Blokzijl.<sup>79</sup> Selain itu, berbagai kegiatan hiburan juga kerap diadakan di Sociëteit Buitenzorg. Sebuah dokumentasi acara yang memuat jadwal kegiatan di tempat tersebut menunjukkan bahwa Sociëteit Buitenzorg menjadi pusat acara malam dan pesta formal, yang disemarakkan oleh orkes dansa seperti The Star Serenaders dari Bandung. Agenda acara di antaranya meliputi konser rakyat di Wilhelminapark, pertunjukan kembang api di Sempoer, hingga pertunjukan kabaret dan pesta gala di rumah kaca Szardaslaube, semuanya berpusat di Sociëteit Buitenzorg.<sup>80</sup> Seiring berkembangnya kota Buitenzorg sebagai pusat pemerintahan gubernur jenderal di luar Batavia, bangunan-bangunan seperti Sociëteit menjadi bagian penting dari perencanaan kota kolonial.<sup>81</sup>

Sociëteit menjadi simbol pemisahan sosial antara masyarakat Belanda dan bumiputera, dengan fungsi utama sebagai ruang hiburan, pesta dansa, diskusi ilmiah, dan politik informal. Kehadiran gedung Sociëteit menggambarkan bagaimana ruang publik pada masa itu dikonstruksi secara eksklusif untuk kepentingan komunitas Eropa, sekaligus memperkuat batas sosial antara penduduk kolonial dan masyarakat bumiputera. Hal ini tercermin dalam laporan majalah *Neerlandia* tahun 1912, yang mendokumentasikan pidato Mr. A.B. Cohen Stuart dalam forum Debatvereniging Afdeling Buitenzorg dari Algemeen Nederlandsch Verbond (A.N.V.).<sup>82</sup> Dalam ceramahnya, Cohen Stuart membahas gagasan besar tentang peran Belanda dalam menciptakan kekuatan penegak hukum internasional dan pentingnya membangkitkan kesadaran perdamaian global. Menariknya, pidato tersebut disampaikan di ruang Sociëteit Buitenzorg, yang saat itu terbuka bagi anggota organisasi kolonial.

Pencatatan kegiatan seperti itu menunjukkan bahwa fungsi bangunan ini melampaui fungsi sosial semata, menjadi pusat wacana intelektual dan politis yang menghubungkan kepentingan kolonial Belanda dengan perkembangan pemikiran

---

<sup>79</sup> *Het exterieur van de Sociëteit in Buitenzorg, nu Bogor, waar in 1911 de cabaretiers Pisuisse en Blokzijl diverse malen optraden.*

<sup>80</sup> *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, "Oranjeavond in Buitenzorg", 6 September 1938, diakses melalui Delpher.

<sup>81</sup> Ratih, Dewi. "Kota Kolonial Hindia Belanda 1800-1942: Ditinjau Dari Permasalahan Sejarah Perkotaan", *Jurnal Artefak*, Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 49–60.

<sup>82</sup> *Neerlandia*. (1912). *Tugas dunia untuk Belanda*. *Neerlandia*, (Oktober 1912). Hlm 13.

internasionalisme awal abad ke-20 sekaligus sebagai pusat hiburan. Ini sekaligus mencerminkan karakteristik kota Buitenzorg sebagai pusat administratif dan ideologis kolonial di Jawa Barat. Gedung ini, yang berada di pusat Buitenzorg, menunjukkan pengaruh kekuasaan kolonial yang menciptakan ruang sosial yang tidak hanya fisik, tetapi juga kultural, dengan membatasi akses kepada orang-orang selain Eropa. Dalam konteks teori ruang publik Jürgen Habermas, *Sociëteit Buitenzorg* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari ruang publik modern di Hindia Belanda. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai arena di mana individu dari berbagai latar belakang dapat berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu sosial dan politik secara rasional dan kritis, terpisah dari kekuasaan negara maupun pasar.<sup>83</sup> Meskipun ruang publik versi kolonial ini tidak bersifat inklusif karena hanya dapat diakses oleh elite Eropa dan bukan penduduk bumiputra, ia tetap merepresentasikan cikal bakal arena diskursif di mana opini publik Eropa kolonial dibentuk dan disalurkan.

Teori penggunaan ruang Edward Relph, *Sociëteit Buitenzorg* merupakan contoh konkret dari *place* yang memiliki makna simbolik dan identitas tersendiri. Relph membedakan antara *space* (ruang sebagai wadah netral) dan *place* (ruang yang diberi makna melalui pengalaman manusia).<sup>84</sup> *Sociëteit Buitenzorg* bukan hanya *space* tempat berlangsungnya acara, namun telah menjadi *place*, ruang yang mengandung pengalaman sosial, identitas kelas kolonial, dan simbol dominasi budaya Barat di wilayah jajahan. Interaksi sosial yang berulang di tempat ini memperkuat ikatan emosional dan memori kolektif penggunanya, serta membentuk pola relasional antara ruang dan kekuasaan.

Bentuk ruang sosial yang menonjol pada masa kolonial di Kota Bogor adalah pasar. Pasar di Bogor telah menjadi salah satu elemen ruang sosial yang berkembang signifikan sejak era kolonial. Pasar pertama di wilayah ini didirikan pada tahun 1770 atas prakarsa Gubernur Jenderal VOC, Petrus Albertus van der

---

<sup>83</sup> Jürgen Habermas. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.

<sup>84</sup> Edward Relph. *Place and Placelessness*. London: Pion Limited, 1976.

Parra.<sup>85</sup> Pasar tersebut, yang dikenal sebagai Pasar Baroe, berdiri di atas lahan sewaan di dekat Kampung Bogor, tepatnya di kawasan yang kini disebut Jalan Suryakencana, di sekitar Babakan Pasar, Bogor Tengah. Lokasinya strategis, berdekatan dengan Vihara Dhanagun dan kediaman Lie Beng Hok, seorang saudagar Tionghoa. Pada awalnya, pasar ini hanya beroperasi dua kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Jumat, mengikuti sistem pasar pekan yang umum pada masa itu. Namun, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan yang melibatkan masyarakat dari daerah sekitar seperti Cisarua, Cianjur, dan Sukabumi, pasar ini bertransformasi menjadi pasar harian yang ramai. Keberhasilan pasar ini tidak hanya mencerminkan perkembangan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang besar bagi van der Parra, dengan pendapatan sekitar 8.000 ringgit dari penyewaan lahan kepada para pedagang.

Perkembangan Pasar Baroe tidak dapat dipisahkan dari peningkatan konektivitas wilayah yang terjadi pada abad ke-19. Pembangunan Jalan Raya Pos oleh Herman Willem Daendels pada tahun 1808 menjadi tonggak penting dalam memperlancar akses transportasi antara Bogor dan wilayah lain, termasuk Batavia. Selanjutnya, pembukaan jalur kereta api Batavia–Buitenzorg pada tahun 1873 semakin memperkuat posisi Bogor sebagai pusat perdagangan regional. Infrastruktur ini memungkinkan distribusi komoditas pertanian seperti kopi, gula, tepung, kentang, dan sayur-mayur dari daerah Puncak ke Batavia dengan lebih efisien. Sekitar 60 persen komoditas yang diangkut dari Bogor merupakan barang primer yang memainkan peran krusial dalam perekonomian kolonial. Pasar ini tidak hanya menjadi pusat distribusi barang, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut.

Selain fungsinya sebagai pusat ekonomi, Pasar Baroe juga memainkan peran penting sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok etnis dan budaya pada tahun 1908. Keberadaan pasar ini memicu perkembangan permukiman berbasis etnis di sekitarnya. Komunitas Tionghoa tumbuh di sepanjang Jalan Suryakencana, permukiman pribumi berkembang di Lebak Pasar,

---

<sup>85</sup> Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, *Selayang Pandang Sejarah Kota Bogor 1945–1970* (Bogor: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, 2016). Hlm 25.

dan komunitas Arab bermunculan di daerah Empang. Interaksi multikultural ini menjadikan pasar sebagai melting pot sosial, tempat berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang yang berbeda bertemu, berdagang, dan berinteraksi, seperti pedagang sayur, pengrajin dan penjual buah.<sup>86</sup> Dengan demikian, pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial masyarakat kolonial di Buitenzorg. Pasar Baroe menjadi ruang yang menghubungkan ekonomi, budaya, dan sosial, menciptakan ekosistem urban yang kaya dan kompleks di tengah kota kolonial.

Perkembangan pasar ini juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman. Dari pasar pekan yang sederhana, Pasar Baroe berevolusi menjadi pusat perdagangan harian yang ramai, didukung oleh infrastruktur modern pada masanya. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga memperkuat peran Bogor sebagai simpul penting dalam jaringan ekonomi kolonial. Keberadaan pasar ini turut membentuk identitas kota Bogor sebagai pusat multikultural yang dinamis, di mana berbagai kelompok etnis hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam ruang kota yang terus berkembang. Dengan demikian, Pasar Baroe bukan hanya sekadar tempat jual beli, tetapi juga simbol integrasi sosial dan ekonomi yang menjadi ciri khas masyarakat kolonial Buitenzorg.



Gambar 6 Markt te Buitenzorg Tahun 1920  
Sumber: KITLV 17349

---

<sup>86</sup> Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, *Selayang Pandang Sejarah Kota Bogor 1945–1970* (Bogor: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, 2016). Hlm 27



Gambar 7 menampilkan suasana pasar tradisional di Bogor pada masa kolonial memberikan bukti visual penting mengenai bagaimana ruang publik difungsikan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Terlihat dalam gambar tersebut barisan kios semi permanen berjajar di sisi jalan tanah berbatu, dengan berbagai pedagang lokal, kebanyakan laki-laki pribumi yang tengah sibuk menjajakan dagangan seperti hasil pertanian, kerajinan, hingga makanan tradisional. Aktivitas ini berlangsung di depan bangunan bertingkat bergaya arsitektur kolonial-Tionghoa, menandakan adanya integrasi antara struktur bangunan Eropa dan peran etnis Tionghoa dalam perdagangan lokal. Posisi para pedagang yang duduk di lantai jalan dengan peralatan sederhana menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi dilakukan dalam bentuk informal dan non-modern, berbeda dengan pasar-pasar di pusat kota Eropa yang lebih tertata dan teratur.

Visualisasi pada gambar 7 memperlihatkan keberagaman sosial di pasar: dari pedagang pribumi yang mengenakan ikat kepala dan sarung, hingga individu yang tampak mengenakan caping besar dan pakaian yang menunjukkan pengaruh Tionghoa atau petani pedesaan. Interaksi di pasar terlihat penuh aktivitas, mencerminkan fungsi pasar sebagai ruang sosial terbuka dengan berbagai kelompok masyarakat bertemu. Keberadaan bangunan dua lantai dengan balkon kayu dan jendela besar di latar belakang mencerminkan adaptasi arsitektur kolonial dengan fungsi komersial, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kalangan pedagang Tionghoa yang memainkan peran perantara dalam sistem distribusi kolonial. Jalanan yang belum beraspal dan kondisi sanitasi yang tampak sederhana juga menggambarkan kondisi urbanisasi yang masih dalam tahap perkembangan, khas kota kolonial yang sedang tumbuh pada awal abad ke-20. Pasar tersebut menunjukkan adanya stratifikasi sosial, peran etnis dalam ekonomi, dan integrasi antara sistem pasar tradisional lokal dengan kebijakan kolonial yang menata ruang kota. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga arena kehidupan sosial dan representasi dari kompleksitas interaksi kolonial antara pemerintah, etnis Tionghoa, dan masyarakat pribumi.

Pasar berfungsi sebagai arena komunikasi masyarakat, tempat terjadinya interaksi sosial yang terbuka dan reflektif, hal ini sesuai dengan teori ruang publik

Habermas. Fungsi ini menjadikan pasar sebagai bagian dari ruang publik di mana identitas kolektif masyarakat kolonial terbentuk. Sementara itu, melalui teori Edward Relph tentang penggunaan ruang, pasar dipahami bukan sekadar sebagai lokasi fisik, melainkan tempat yang sarat makna dan keterikatan emosional yang terbentuk melalui pengalaman sosial masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pasar di Bogor masa kolonial mencerminkan bagaimana ruang publik dapat mengalami konstruksi sosial yang kompleks, serta menjadi sarana penting dalam proses sosial, ekonomi, dan kultural di kota kolonial seperti Buitenzorg.

### 3.4 Ruang Ilmiah

Sebagai salah satu institusi penting dalam perkembangan intelektual pada masa kolonial di Buitenzorg, Bibliotheca Bogoriensis memainkan peran sentral dalam mendukung aktivitas ilmiah dan administrasi kolonial. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi pusat penyimpanan pengetahuan dan referensi bagi para peneliti serta pejabat pemerintah, tetapi juga mencerminkan upaya kolonial Belanda dalam membangun infrastruktur intelektual yang mendukung eksplorasi ilmiah di wilayah Hindia Belanda, khususnya di bidang botani dan pertanian. Bibliotheca Bogoriensis didirikan atas prakarsa Justus Karl Hasskarl, asisten hortulanus di 's Lands Plantentuin te Buitenzorg (Kebun Raya Bogor) pada tahun 1842.<sup>87</sup> Pendirian perpustakaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian botani tropis di Hindia Belanda. Koleksi awalnya terdiri dari 25 buku yang dibeli dari Dr. Jacques Pierot, seorang botanis yang dikirim oleh pemerintah Belanda ke Tiongkok. Seiring waktu, perpustakaan ini menerima sumbangan buku dari para botanis yang berkunjung, sehingga koleksinya berkembang menjadi salah satu yang paling lengkap dalam bidang botani tropis di Asia Tenggara.<sup>88</sup> Berdirinya perpustakaan ini sebagai pusat dokumentasi ilmiah yang mendukung penelitian di bidang botani, zoologi, dan agrikultur.

Perpustakaan ini awalnya merupakan bagian integral dari s'Lands Plantentuin te Buitenzorg, yang berperan penting dalam pengembangan ilmu

---

<sup>87</sup> Sahertian-Bakhoven, P. "Bibliotheca Bogoriensis, Its History and Prospects". *Flora Malesiana Bulletin* 27, no. 1 (January 1974), hlm 2196.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm 2196.

pengetahuan dan teknologi pertanian di Hindia Belanda.<sup>89</sup> Penamaan awal perpustakaan yang berada di lingkungan Kebun Raya Bogor pada tahun 1905 adalah *Bibliotheek 's Lands Plantentuin te Buitenzorg*. Dalam bahasa Belanda, istilah ini berarti "Perpustakaan Kebun Raya Negeri di Buitenzorg". Nama tersebut mencerminkan status perpustakaan sebagai bagian resmi dari institusi ilmiah pemerintah kolonial yang berada di bawah pengelolaan Kebun Raya Buitenzorg (sekarang Kebun Raya Bogor). Penamaan ini juga menegaskan fungsi utamanya sebagai pusat dokumentasi dan literatur ilmiah yang mendukung kegiatan botani dan penelitian tumbuhan yang dilakukan di Kebun Raya.

Perubahan besar dalam struktur kelembagaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terjadi pada tahun 1911, ketika *Departement van Landbouw* (Departemen Pertanian) mengalami reorganisasi dan diperluas menjadi *Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel*, atau dalam bahasa Indonesia berarti Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk memperluas cakupan kelembagaan dalam mengelola sektor-sektor produktif yang semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada pertanian tetapi juga mencakup bidang kerajinan dan perdagangan. Sebagai bagian dari reorganisasi tersebut, lembaga-lembaga yang berada di bawah departemen ini kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh bagian atau *afdelingen* sesuai dengan bidang kerja dan spesialisasinya. Dengan adanya reorganisasi ini, *Blibiotecha* diubah namanya menjadi PUSTAKA. Dalam pengelompokan ini, PUSTAKA ditempatkan dalam Kelompok I (*Bureau*) bersama dengan unit administrasi dan unit reproduksi dokumen.

PUSTAKA kemudian dimanfaatkan dan ditetapkan sebagai pusat koordinasi bagi perpustakaan-perpustakaan lembaga yang berada di bawah Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan, baik yang berada di Bogor maupun di Batavia (Jakarta). Peran baru ini disertai dengan perubahan nama menjadi *Centrale Wetenschappelijke Bibliotheek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel*, yang berarti Pusat Perpustakaan Ilmiah

---

<sup>89</sup> Inotji Hajatullah, Surya Mansjur, dan Maksum, *Perjalanan 160 Tahun Bibliotheca Bogoriensis* (Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, 2002), hlm. 7–9.

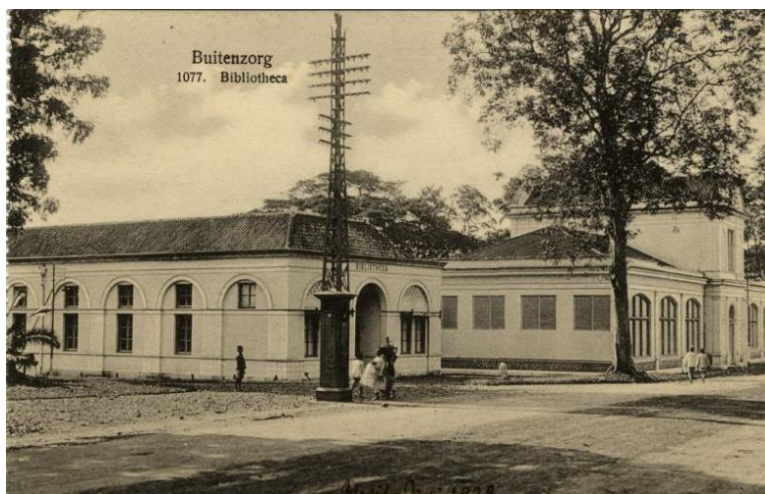
Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan. Sebagai pusat perpustakaan, PUSTAKA memiliki tanggung jawab untuk mengelola hubungan fungsional dengan berbagai perpustakaan cabang yang ada di lembaga-lembaga terkait. Hubungan tersebut bersifat koordinatif dalam hal layanan dan pengelolaan informasi, namun secara struktural dan administratif, masing-masing perpustakaan cabang tetap berada di bawah kendali lembaga induknya masing-masing. Artinya, meskipun PUSTAKA berperan sebagai pusat, otonomi kelembagaan perpustakaan-perpustakaan cabang tetap dipertahankan.

Sebagai ruang publik yang sangat terbatas aksesnya, Bibliotheca Bogoriensis pada masa kolonial hanya diperuntukkan bagi kalangan ilmuwan Eropa dan birokrat kolonial yang terlibat dalam riset dan administrasi. Ruang ini bukanlah ruang publik dalam pengertian modern yang terbuka untuk masyarakat luas, namun dapat dianggap sebagai ruang publik intelektual yang berarti pertukaran ilmu pengetahuan diorganisir secara tertutup dan eksklusif. Dalam konteks teori ruang publik Habermas, perpustakaan ini bisa dilihat sebagai suatu arena yang memungkinkan terbentuknya diskursus ilmiah meskipun masih berada di bawah kontrol kolonial yang bersifat hierarkis dan terbatas. Pada masa kolonial, fungsi utama Bibliotheca Bogoriensis adalah sebagai pusat dokumentasi dan riset ilmiah yang mendukung kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam buku *Perjalanan 160 tahun Bibliotheca Bogoriensis* karya Inotji Hajatullah, Surya Mansjur dan Maksum, perpustakaan ini memiliki koleksi yang sangat kaya mengenai buku tentang botani dan agrikultur, yang digunakan untuk mendalami potensi alam dan pengelolaan sumber daya alam tropis.<sup>90</sup> Perpustakaan ini juga menjadi tempat bagi para ilmuwan dan pegawai pemerintah Belanda untuk

---

<sup>90</sup> Inotji Hajatullah, Surya Mansjur, dan Maksum, *Perjalanan 160 Tahun Bibliotheca Bogoriensis* (Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, 2002), hlm 18

mengakses informasi ilmiah terkait kebijakan perkebunan, yang sangat penting bagi ekonomi kolonial.



Gambar 7 Buitenzorg Bibliotheca, tahun 1910.  
Sumber: KITLV 1401388

Koleksi yang ada di perpustakaan ini sebagian besar ditujukan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam. Sebagai contoh, pengembangan tanaman komoditas seperti teh dan karet sangat bergantung pada riset ilmiah yang berbasis pada literatur yang ada di Bibliotheca Bogoriensis. Namun, meskipun berfungsi sebagai ruang pertukaran pengetahuan, akses ke perpustakaan ini terbatas pada kalangan elit kolonial, baik Eropa maupun segelintir elit lokal yang terlibat dalam penelitian ilmiah di bawah kontrol pemerintah kolonial. Oleh karena itu, meskipun terdapat aktivitas intelektual yang berlangsung di dalamnya, ruang ini tidak dapat dianggap sebagai ruang publik dalam arti yang lebih luas dan inklusif sebagaimana dipahami oleh Habermas.

Fungsi Bibliotheca Bogoriensis sangat relevan dengan teori penggunaan ruang dari Edward Relph. ada masa kolonial, perpustakaan ini memiliki makna sosial dan politik yang kuat, berfungsi sebagai pusat riset ilmiah untuk mendukung kebijakan kolonial Belanda dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti perkebunan. Fungsi ini menciptakan *sense of place* yang terkait dengan penguasaan pengetahuan alam untuk kepentingan ekonomi kolonial.

### 3.5 Ruang Administrasi Kekuasaan Kolonial

Pada masa kolonial, ruang administrasi pemerintahan menjadi salah satu bentuk ruang publik yang memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat. Kedung Keresidenan Buitenzorg awalnya dibangun sebagai bagian dari kebijakan administratif Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam memusatkan kontrol kekuasaan di daerah-daerah penting Pulau Jawa pada awal abad ke-19. Buitenzorg sejak masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels sudah dipandang sebagai kawasan strategis karena iklimnya yang sejuk dan letaknya yang relatif dekat dengan Batavia. Fungsi keresidenan ditetapkan melalui reorganisasi administratif pasca pendirian sistem keresidenan di Jawa pada 1817 yang diperkuat oleh pemerintah kolonial setelah masa transisi Inggris Belanda.<sup>91</sup> Bangunan ini menjadi simbol kekuasaan kolonial dengan penataan ruang yang mengutamakan keterpisahan antara wilayah pemerintahan dan masyarakat lokal.

Tidak hanya sebagai kantor administratif, kedung ini berfungsi sebagai rumah dinas Residen, lengkap dengan ruang perjamuan, perpustakaan pribadi, dan ruangan pertemuan resmi untuk keperluan birokrasi serta diplomasi lokal. Seperti tercermin dalam buku “Kota di Djawa Rempoe Doeloe” karya Olivier Raap menjelaskan bahwa rumah dinas para pejabat tempo dulu, termasuk di Buitenzorg, dibangun dengan arsitektur yang memadukan gaya Eropa dan tradisional, serta difungsikan sebagai tempat tinggal dan kantor resmi.<sup>92</sup> Tata letak ini memperkuat status keresidenan sebagai poros utama kota kolonial, bersama kompleks Istana Buitenzorg dan Kebun Raya. Peran Kedung Keresidenan dalam struktur sosial masyarakat kolonial sangat besar. Residen Buitenzorg memiliki otoritas atas masalah sipil, perpajakan, serta hubungan antara komunitas Eropa dan bumiputera. Oleh karena itu, kedung juga menjadi lokasi diadakannya rapat-rapat penting bersama para wedana, asisten residen, dan tokoh-tokoh lokal yang mewakili struktur pemerintahan pribumi. Seperti sebuah foto dari sekitar tahun 1900

---

<sup>91</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* Jilid I, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 125.

<sup>92</sup> Olivier Johannes Raap, *Kota di Djawa Tempo Doeloe* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm 78.

menunjukkan rumah asisten residen di Buitenzorg, yang menggambarkan arsitektur dan penataan ruang pada masa itu.<sup>93</sup> Selain fungsi administratif, tempat ini juga menjadi arena penyebaran nilai-nilai kolonial melalui perjamuan, pesta kenegaraan, dan kegiatan sosial elite.<sup>94</sup> Setelah reformasi pemerintahan, kedung keresidenan berubah menjadi kantor pembantu gubernur pada tahun 1928.



Gambar 8 Assistant Resident te Buitenzorg tahun 1900  
Sumber: KITLV Leiden

Jika dikaitkan dengan fungsi Kedung Keresidenan Buitenzorg, maka secara historis pada masa kolonial, bangunan ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ruang publik menurut Habermas. Sebagai rumah dinas dan kantor Residen, fungsi utama kedung adalah administratif dan bersifat vertikal hirarkis. Bangunan ini menjadi simbol kekuasaan negara kolonial yang terpisah dari akses warga biasa. Pertemuan yang terjadi di dalamnya bersifat elitis, terbatas pada pejabat pemerintah dan kelompok priayi yang sudah terserap ke dalam struktur kolonial. Dalam hal ini, Kedung Keresidenan lebih merepresentasikan ruang kekuasaan negara (*state power*), bukan ruang diskursif masyarakat.

<sup>93</sup> De woning van de assistent-resident te Buitenzorg," *Het Geheugen van Nederland*.

<sup>94</sup> Ratih Dwi, "Kota Kolonial Hindia Belanda 1800–1942: Ditinjau dari Permasalahan Sejarah Perkotaan," *Jurnal Artefak* Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 54.

Kantor pos merupakan salah satu bentuk ruang administrasi publik yang dibangun oleh pemerintah kolonial untuk mendukung sistem komunikasi dan pelayanan masyarakat di wilayah Buitenzorg. Kantor pos di Kota Bogor terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 5, Paledang, Bogor Tengah, bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengiriman dan penerimaan surat, tetapi juga menjadi saksi sejarah transformasi fungsi ruang publik pada masa kolonial. Gedung ini awalnya merupakan gereja yang dibangun pada 13 April 1845 atas perintah Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen. Gereja tersebut diperuntukkan bagi komunitas Kristiani, baik Protestan maupun Katolik, dan menjadi gereja pertama di Buitenzorg pada masa itu.<sup>95</sup> Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah gereja di wilayah Buitenzorg, gedung tersebut kemudian dialihfungsikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi kantor pos.

Pemerintah kolonial Belanda mulai membentuk sistem dinas pos di Hindia Belanda sejak tahun 1877 untuk mendukung kelancaran administrasi dan komunikasi antarkawasan. Seiring waktu, pemerintah mengembangkan jaringan pos yang semakin luas dan efisien, mencakup pengiriman surat maupun barang ke berbagai wilayah, baik domestik maupun internasional. Pemerintah juga meningkatkan sarana pendukung seperti jalur transportasi dan infrastruktur kantor pos guna mempercepat distribusi informasi.

Perubahan fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan administrasi kolonial yang menekankan efisiensi serta pemanfaatan infrastruktur yang ada untuk mendukung sistem komunikasi dan pengiriman logistik antar wilayah jajahan. Kantor pos menjadi elemen penting dalam sistem birokrasi kolonial karena berperan dalam menjaga konektivitas antara pusat pemerintahan di Batavia dengan wilayah-wilayah administratif lain seperti Buitenzorg. Peran strategis kantor pos Buitenzorg semakin ditekankan melalui adanya Surat Edaran tahun 1903 No. 13, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Pos dan Telegraf pada 19 Februari 1903. Surat ini menjelaskan bahwa tidak semua surat yang dialamatkan kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal (H.E. dan G.G.) berhak atas pengecualian biaya

---

<sup>95</sup> Neneng Hendriyani, *Bogor: Peninggalan Sejarah dari Masa ke Masa* (Bandung: SituSeni, 2017), hlm 95.



pengiriman pos. Hanya dokumen yang benar-benar menyangkut urusan pribadi Gubernur Jenderal yang dapat dikecualikan.<sup>96</sup>

Surat edaran tersebut mengharuskan petugas pos untuk menegaskan kepada pengirim bahwa surat yang hanya menyebutkan nama Gubernur Jenderal dalam alamat tetap dikenakan biaya kirim dan harus dibubuhi materai. Jika surat tersebut tidak memenuhi syarat, ongkos kirim tetap akan dikenakan, meski pengembalian biaya dapat dilakukan oleh kantor di Buitenzorg, tempat kedudukan resmi Gubernur Jenderal saat musim hujan. Hal ini menandakan status khusus Buitenzorg sebagai pusat administratif musiman dan pentingnya kantor pos setempat sebagai penghubung utama antara otoritas pusat dan daerah. Menjelang tahun 1908, pemerintah kolonial telah berhasil menjadikan sistem pos Hindia Belanda sebagai bagian dari jaringan komunikasi global. Hal ini terbukti melalui keanggotaan Hindia Belanda dalam *Union Postale Universelle* (UPU), sebuah organisasi internasional yang mengatur standar pengiriman surat dan barang antarnegara. Keikutsertaan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial secara aktif menempatkan Hindia Belanda dalam sistem komunikasi internasional, sekaligus memperkuat fungsi kantor pos sebagai sarana pelayanan publik modern pada masa kolonial.

Selain fungsinya yang vital dalam sistem komunikasi kolonial, kantor pos ini juga merupakan representasi arsitektur kolonial yang khas. Gaya bangunan yang elegan dan kokoh menunjukkan adaptasi gaya arsitektur Belanda dengan iklim tropis Hindia Belanda, yang dikenal sebagai *Indiesche Architectuur*. Dengan demikian, kantor pos di Bogor bukan hanya menjadi simbol penting sistem komunikasi dan administrasi kolonial, tetapi juga merupakan wujud dari kebijakan kolonial yang terorganisir dan terstruktur. Artinya regulasi seperti Surat Edaran 1903 No. 13 memainkan peran dalam mengatur distribusi dan legitimasi korespondensi administratif pada masa itu.

---

<sup>96</sup> Verzameling (codificatie) van de tot 1 Jan. 1917 verschenen en op 1 Mei van dat zelfde jaar nog van kracht zijnde circulaires Gouvernements Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederl.-Indië: vastgesteld bij beschikking van den chef van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst van 29 Mei 1917 no 20721. Hlm 31, Diakses melalui Delpher.

Kantor pos di Kota Bogor yang dibangun pada masa kolonial tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas komunikasi administratif, tetapi juga merepresentasikan transformasi ruang publik yang berlangsung dalam tatanan kota kolonial. Dalam kerangka ruang publik menurut Habermas, kantor pos dapat diposisikan sebagai arena komunikasi yang diatur negara, proses pertukaran informasi berlangsung secara terstruktur. Meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan ruang diskursif bebas seperti dalam konsep Habermas, kantor pos tetap memainkan peran penting dalam membentuk alur informasi dan interaksi sosial antar lapisan masyarakat kolonial. Selain itu, jika dilihat dari perspektif Edward Relph mengenai penggunaan dan makna ruang, peralihan fungsi gedung ini dari gereja menjadi kantor pos mencerminkan adanya perubahan makna tempat (*sense of place*) yang erat kaitannya dengan intervensi kekuasaan kolonial terhadap ruang kota. Kantor pos menjadi tempat yang mengalami *placelessness* dalam arti semula sebagai ruang ibadah, namun kemudian mendapatkan makna baru sebagai pusat kegiatan administrasi dan komunikasi. Proses ini menunjukkan bagaimana ruang publik di kota kolonial tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kekuasaan yang terus berubah seiring waktu.

### **3.6 Sarana Ibadah**

Pada masa kolonial, pembangunan sarana ibadah di Buitenzorg mencerminkan dinamika sosial dan keagamaan yang berakar pada struktur masyarakat kolonial. Sebagai kota administratif dan tempat peristirahatan bagi pejabat tinggi Hindia Belanda, Buitenzorg menjadi lokasi strategis bagi pendirian tempat-tempat ibadah yang melayani kebutuhan spiritual komunitas Eropa maupun penduduk lokal. Sarana ibadah seperti gereja, masjid, dan kelenteng tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, identitas budaya, dan interaksi antarkelompok dalam ruang kota kolonial yang terstruktur secara hierarkis. Pemanfaatan ruang publik untuk fungsi keagamaan ini memperlihatkan bagaimana agama turut mewarnai tata ruang dan kehidupan sosial di Buitenzorg sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Dua gereja besar yang tercatat dalam dokumen kolonial, yaitu gereja Protestan yang terletak di kawasan Kebun Raya dan gereja Katolik yang berdekatan

dengan Hotel du Chemin de Fer, mencerminkan bagaimana ruang kota dibentuk untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Eropa sekaligus memperkuat struktur kolonial melalui institusi agama.<sup>97</sup> Gereja Protestan di Buitenzorg, yang berdiri di tengah kawasan hijau Kebun Raya, memberikan kesan keteraturan, kesederhanaan, dan keanggunan visual yang sejalan dengan estetika tata kota kolonial. Lokasinya yang berada di pusat kota bukan hanya menandakan pentingnya institusi Protestan sebagai agama resmi pemerintah kolonial, tetapi juga mengindikasikan simbol kekuasaan kolonial yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Sebelum umat Katolik memiliki gereja sendiri, mereka pun sempat menggunakan gereja Protestan tersebut untuk keperluan ibadah, yang menunjukkan bahwa gereja ini sempat memiliki fungsi lintas denominasi dalam konteks kolonial awal.

Kehadiran Gereja Katolik di Buitenzorg tidak lepas dari dinamika misi Katolik di Hindia Belanda. Pada masa-masa awal, umat Katolik di Buitenzorg tergolong kecil jumlahnya, dan pelayanan keagamaan dilakukan secara terbatas oleh misionaris yang datang dari Batavia, seperti P. Hendrichs. Ibadah Katolik pada masa itu masih dilakukan secara bergiliran di gereja simultan, gedung netral yang juga digunakan umat Protestan yang tidak memiliki ciri khas gereja Katolik seperti altar, rel komuni, dan bangku pengakuan dosa. Situasi ini memunculkan keinginan kuat dari umat untuk memiliki ruang ibadah yang benar-benar mencerminkan identitas mereka. Pertumbuhan jemaat yang signifikan pada tahun 1880 menjadi titik balik. Keberatan terhadap penggunaan gereja simultan mendorong Uskup untuk membeli sebuah rumah besar dan halaman di kawasan Bantammerweg yang strategis di Buitenzorg. Pada 17 Mei 1881, untuk pertama kalinya Misa Kudus dirayakan di galeri belakang rumah tersebut, yang berukuran 15 × 8 meter. Altar yang sebelumnya digunakan secara berpindah kini diletakkan secara permanen, menandai awal berdirinya gereja Katolik permanen di Buitenzorg.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Gids voor Buitenzorg en Omstreken* (Batavia: G. Kolff & Co., 1905), hlm 117

<sup>98</sup> M. J. D. Claessens, *Gouden Priesterfeest van Mgr. M. J. D. Claessens op 15 April 1926* (1926), hlm 6. Diakses melalui Delpher.

Peningkatan jumlah komunitas Katolik serta kehadiran imam Katolik di Buitenzorg pada awal abad ke-20 mendorong pembangunan gereja Katolik sendiri. Gereja tersebut dibangun pada tahun 1904–1905 dalam gaya arsitektur Gotik awal dengan panjang 54 meter dan lebar 18 meter. Dibangun di bawah pengawasan arsitek Belanda MJ Hulswit, bangunan ini menjadi salah satu gereja terbesar dan terindah di Buitenzorg<sup>2</sup>. Penggunaan material batu bata dan atap besi menandakan bahwa pembangunan ini tidak hanya untuk keperluan fungsional, tetapi juga merupakan pernyataan simbolik akan kekokohan dan keabadian iman Katolik di wilayah kolonial. Gereja Katolik ini berada tidak jauh dari Suaka Vincentius, sebuah lembaga sosial keagamaan yang didirikan pada tahun 1887 dan diperluas pada tahun 1900.<sup>99</sup> Tujuan dari lembaga ini adalah untuk merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak laki-laki dari kalangan kurang mampu yang beragama Katolik. Jumlah anak yang dititipkan terus bertambah, hingga pada tahun 1889, sebuah gedung baru dibangun untuk menampung 45 anak laki-laki.<sup>100</sup>

Mereka dibekali dengan pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan agar dapat bersaing dalam ujian calon pegawai rendahan serta siap masuk sekolah kejuruan. Lembaga ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan misi Katolik yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga praktis dalam mendukung struktur sosial kolonial melalui kaderisasi tenaga kerja dari kalangan umat Katolik. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari fungsi sosial gereja, yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengasuhan dan pendidikan anak-anak terlantar.<sup>101</sup> Penempatan strategis gereja dan lembaga pendidikan di tengah kota menunjukkan bahwa ruang ibadah tidak hanya dirancang untuk kebutuhan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan. Dengan demikian, fungsi ruang keagamaan di Buitenzorg pada masa kolonial tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan kota kolonial yang sarat akan dimensi ideologis dan representasi kekuasaan.

Keberadaan institusi gereja Protestan di Buitenzorg telah tercatat sejak abad ke-19, beriringan dengan berkembangnya pusat pemerintahan kolonial. Meskipun

---

<sup>99</sup> *Gids voor Buitenzorg en Omstreken* (Batavia: G. Kolff & Co., 1905), hlm 117.

<sup>100</sup> M. J. D. Claessens, *Gouden Priesterfeest van Mgr. M. J. D. Claessens op 15 April 1926* (1926), hlm 6.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 7

bangunan permanen gereja Zebaoth baru dibangun pada tahun 1920, kegiatan ibadah Protestan telah berlangsung lebih dahulu di bangunan yang terletak di lokasi yang sama, yang kemudian dialihfungsikan menjadi kantor pos setelah gereja dipindahkan ke sisi bangunan tersebut. Perpindahan fungsi ini menunjukkan adanya dinamika perubahan penggunaan ruang kolonial yang tidak terlepas dari kebutuhan reorganisasi kota dan simbolisasi kekuasaan. Gereja ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yakni berdekatan dengan Istana Gubernur Jenderal dan Kebun Raya yang dibangun pada tahun 1920. Penempatan ini tidak bersifat kebetulan, melainkan mencerminkan bagaimana kekuasaan kolonial Belanda mengintegrasikan institusi agama Protestan sebagai bagian dari pusat administratif dan ideologis kota. Peletakan batu pertama pembangunan gereja ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal ke-61, J.P. Graaf van Limburg Stirum, yang mempertegas keterkaitan langsung antara gereja dan institusi kolonial.

Gereja Zeaboth pada awalnya secara eksklusif diperuntukkan bagi komunitas Eropa, terutama mereka yang tergabung dalam *Nederlandschsprekende Gemeente* (komunitas berbahasa Belanda). Sementara itu, umat Protestan non-Eropa, termasuk pribumi, diarahkan untuk beribadah di tempat lain, yakni di bangunan yang kini beralih fungsi menjadi Kantor Pos Pusat Bogor. Segregasi ini menggambarkan dengan jelas bagaimana ruang publik keagamaan pada masa kolonial diatur berdasarkan klasifikasi rasial dan status sosial, memperkuat struktur hierarki masyarakat kolonial yang telah tertanam dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian, gereja ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai representasi visual kekuasaan dan identitas kolonial yang tertanam dalam ruang kota.

Sarana ibadah memegang peranan penting dalam membentuk identitas sosial serta relasi antarkelompok etnis dan kehidupan keagamaan masyarakat pribumi dan Timur Asing di Buitenzorg pada masa kolonial. Berdasarkan buku *Gids voor Buitenzorg en omstreken* tahun 1905, diketahui bahwa di Buitenzorg terdapat dua masjid utama yang melayani umat Islam, yaitu Masjid di Aloen-aloen Empang dan masjid milik pribadi warga Arab, Sajid Abdullah bin Mochsin al-Atas, yang terletak di jalan Tengah Empang. Masjid yang pertama, terletak di kawasan

Aloen-aloen Empang, merupakan masjid besar yang dapat diakses oleh semua umat Islam, baik pribumi maupun keturunan Arab.<sup>102</sup> Keberadaan masjid ini menunjukkan adanya upaya pemerintah kolonial menyediakan ruang publik keagamaan yang inklusif bagi umat Islam, meskipun tetap dalam pengawasan sistem politik etis dan struktur kolonial yang hierarkis. Letaknya yang berada di alun-alun sebuah pusat administratif dan simbol kekuasaan kolonial, juga memperlihatkan pentingnya fungsi masjid dalam struktur kota kolonial. Masjid ini menjadi tempat berkumpul masyarakat Islam untuk melaksanakan ibadah, termasuk salat Jumat dan perayaan hari besar keagamaan.

Masjid kedua yang disebutkan dalam buku *Gids voor Buitenzorg en omstreken* tahun 1905 merupakan masjid milik pribadi, yang dibangun oleh seorang tokoh Arab terkemuka, Sajid Abdullah bin Mochsin al-Atas.<sup>103</sup> Masjid ini meskipun terbuka bagi semua Muslim, namun digunakan secara eksklusif oleh komunitas Arab. Hal ini memperlihatkan adanya segregasi keagamaan yang didasarkan pada identitas etnis, meskipun sama-sama memeluk agama Islam. Penghormatan terhadap masjid ini oleh komunitas Arab tercermin dari pernyataan bahwa masjid tersebut “menyerah pada kekudusan di antara orang-orang sebangsanya,” yang menunjukkan bahwa tempat ibadah ini memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi di kalangan Arab Hadhrami. Menariknya, kedua masjid ini sudah menggunakan penerangan gas, menandakan adanya modernisasi fasilitas ibadah yang mengikuti perkembangan teknologi kolonial saat itu. Fasilitas ini juga menjadi simbol kemajuan kota Buitenzorg sebagai kota peristirahatan dan pusat administrasi kolonial yang modern. Fenomena ini mencerminkan bahwa ruang ibadah dalam masyarakat kolonial tidak hanya berfungsi sebagai tempat spiritual, tetapi juga menjadi penanda sosial dan arena pembentukan identitas kelompok.

Gereja Protestan dan Katolik di Buitenzorg pada masa kolonial tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial penting bagi komunitas kolonial Eropa dan elit yang berkumpul untuk memperkuat solidaritas dan mempertahankan legitimasi kekuasaan melalui simbol agama dan budaya,

---

<sup>102</sup> *Gids voor Buitenzorg en Omstreken* (Batavia: G. Kolff & Co., 1905), hlm 119

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 119

sebagaimana dijelaskan dalam teori ruang publik Jürgen Habermas. Ruang publik yang diciptakan oleh gereja tersebut cenderung eksklusif dan kurang inklusif bagi masyarakat pribumi. Sementara itu, masjid yang hadir sebagai pusat ibadah umat Islam pribumi memiliki makna ruang yang berbeda, bukan hanya sebagai tempat religius tetapi juga sebagai ruang berpengalaman yang kuat bagi komunitas pribumi, sesuai teori penggunaan ruang Edward Relph. Masjid menjadi simbol identitas budaya dan sosial yang melambangkan perlawanan sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat pribumi yang berbeda dari komunitas kolonial. Ketiga institusi keagamaan ini, gereja Protestan, gereja Katolik, dan masjid memanifestasikan hierarki sosial dan relasi kekuasaan kolonial yang terlihat dalam penggunaan ruang yang berbeda.

### **3.7 Bioskop**

Buitenzorg menjadi salah satu kota penting dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Selain berfungsi sebagai kota peristirahatan bagi Gubernur Jenderal, Bogor juga mengalami perkembangan signifikan dalam bidang infrastruktur dan kebudayaan, termasuk hadirnya bioskop sebagai bentuk hiburan modern. Masuknya film ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20 membawa perubahan besar dalam cara masyarakat kota mengakses hiburan, dan Bogor menjadi salah satu kota yang merespons cepat perkembangan ini dengan mendirikan gedung-gedung bioskop.

Bioscoop Maxim adalah pertama yang tercatat di Bogor yang kelak dikenal sebagai Presiden Theatre. Letaknya berada di kawasan Tjikeumeuhweg (kini Jalan Merdeka), dekat dengan pusat kota kolonial dan tidak jauh dari kawasan Pecinan Sukasari. Gedung ini didirikan oleh pengusaha Tionghoa dan menjadi tempat pemutaran film-film Barat, India, serta beberapa film produksi lokal Hindia Belanda. Bioskop ini kemudian berkembang menjadi pusat hiburan utama yang tidak hanya dikunjungi oleh warga Eropa, tetapi juga oleh kalangan Timur Asing (Tionghoa, Arab) dan Pribumi, meskipun terdapat pembatasan dan segregasi yang

ketat dalam pengaturan tempat duduk dan harga tiket masuk sesuai dengan ras dan kelas sosial.<sup>104</sup>

Pemanfaatan bioskop di Bogor pada masa kolonial sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang berlaku di Hindia Belanda. Film menjadi medium hiburan yang elit pada awalnya, khusus bagi warga Eropa dan elit Timur Asing. Namun seiring waktu, masyarakat bumiputra kelas menengah juga mulai mengakses bioskop, meski masih dalam batasan tertentu. Bioskop di Bogor seperti Capitol Bioscoop dan Park Bioscoop menunjukkan bahwa kota ini telah mengalami modernisasi dalam bentuk konsumsi budaya populer. Film-film yang ditayangkan umumnya berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, seperti film bisu bergenre petualangan atau drama, sebelum masuknya film bersuara di akhir 1920-an. Kehadiran film India seperti dari studio Bombay juga menjadi alternatif hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat bumiputra karena kedekatan nilai emosional dan naratifnya.<sup>105</sup>

Bioskop bukan hanya sekadar tempat menonton film. Di dalam struktur kota kolonial, bioskop memainkan peran sebagai ruang sosial baru yang mempertemukan beragam kelompok masyarakat urban. Akan tetapi, dalam praktiknya, bioskop juga mencerminkan ketimpangan dan diskriminasi rasial. Tiket dibagi ke dalam kelas-kelas, mulai dari kelas satu untuk orang Eropa, kelas dua untuk Timur Asing, dan kelas tiga untuk bumiputra. Tempat duduk, pintu masuk, dan fasilitas berbeda sesuai dengan kategori ini. Hal ini menegaskan bahwa meskipun film memperkenalkan modernitas dan ruang pertemuan baru, tetap tunduk pada logika kekuasaan kolonial yang segregatif dan diskriminatif.

Pembangunan bioskop di Buitenzorg juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Kebanyakan bioskop dimiliki atau dikelola oleh pengusaha Tionghoa yang melihat peluang besar dalam bisnis hiburan. Mereka mengimpor film, membangun jaringan distribusi, dan membentuk pasar lokal yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa bioskop bukan hanya ruang hiburan pasif, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi kota kolonial yang berkembang pesat di sektor non

---

<sup>104</sup> Ismail Fahmi. (2020). *Bogor (Buitenzorg) Bioscoop*.

<sup>105</sup> Rifai Shodiq. (2021). *Menjelajahi Bioskop Pada Masa Kolonial*.



pemerintahan. Dengan demikian, pada masa kolonial, bioskop di Buitenzorg bukan hanya simbol modernitas, tetapi juga cerminan stratifikasi sosial, relasi kuasa kolonial, serta dinamika budaya populer urban. Bioskop hadir di tengah kota kolonial yang berkembang pesat, membawa hiburan, namun tetap terikat oleh batas-batas rasial dan kelas sosial yang menjadi ciri khas Hindia Belanda. Keberadaannya menjadi penanda penting bagi sejarah budaya visual dan perubahan gaya hidup masyarakat kota Bogor yang berada dalam orbit kekuasaan kolonial Belanda.

Keberadaan bioskop di Buitenzorg pada masa kolonial tidak hanya menjadi penanda masuknya budaya hiburan modern ke Hindia Belanda, tetapi juga mencerminkan perubahan struktur sosial dan tata ruang kota kolonial. Jika ditelaah menggunakan teori ruang publik dari Habermas, bioskop pada dasarnya berpotensi menjadi ruang public tempat warga bertemu, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, dalam konteks kolonial, ruang publik yang terbentuk melalui institusi bioskop tidak bersifat netral dan terbuka, melainkan terfragmentasi oleh kekuasaan kolonial dan struktur sosial rasial. Tempat duduk di bioskop seperti Bioscoop Maxim, Capitol, dan Park Bioscoop dibagi berdasarkan kelas ras: Eropa, Timur Asing (umumnya Tionghoa), dan bumiputra, memperlihatkan bahwa ruang publik ini tidaklah egaliter. Hal ini menjadikan bioskop sebagai bentuk “*pseudo public sphere*” yaitu, ruang yang tampak terbuka namun sejatinya eksklusif dan dikendalikan oleh elite kolonial serta pemilik modal.

Teori Edward Relph tentang makna ruang dan tempat juga relevan untuk memahami bagaimana bioskop diperlakukan oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Bagi orang Eropa, bioskop adalah simbol kemajuan dan tempat bersantai yang sesuai dengan standar modernitas mereka. Bagi kelompok Timur Asing, terutama komunitas Tionghoa, bioskop juga menjadi ruang ekonomi dan kultural baik sebagai konsumen maupun sebagai pemilik bisnis hiburan. Sedangkan bagi masyarakat bumiputra, bioskop bisa dimaknai sebagai tempat yang sekaligus menarik dan asing. Mereka menyaksikan modernitas dari kejauhan, sering kali tidak memiliki akses penuh karena keterbatasan ekonomi maupun diskriminasi rasial. Edward Relph menyebut kondisi ini sebagai “*existential outsidersness*”, yakni

pengalaman berada di suatu ruang tanpa ikatan emosional atau hak penuh atas ruang tersebut. Dalam konteks kota kolonial Bogor, bioskop menjadi ruang yang diciptakan secara sosial oleh sistem kekuasaan, bukan hasil dari interaksi yang setara antar warga kota.

Bioskop dalam ruang kota kolonial juga memperkuat segregasi spasial yang mencerminkan struktur kekuasaan. Letaknya yang berada di pusat kota seperti di kawasan sekitar Pasar Anyar dan Jalan Mayor Oking memperlihatkan posisi strategisnya dalam jaringan ruang kota, namun akses terhadap ruang ini tetap diatur oleh kolonial. Fungsi utama bioskop sebagai sarana hiburan massa tidak sepenuhnya netral, karena film-film yang diputar pun menjadi alat propaganda budaya Barat yang menyampaikan nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, bioskop bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga arena penyebaran ideologi dan kontrol sosial. Dengan demikian, ketika dilihat dari perspektif Habermas dan Relph, bioskop di Buitenzorg pada masa kolonial merupakan ruang sosial yang kompleks sebuah tempat yang memadukan hiburan, eksklusi, dan simbolisasi kekuasaan kolonial di tengah masyarakat yang terstruktur secara hirarkis.

### 3.8 Jalan Raya

Jalan Raya Pos atau dalam bahasa Belanda disebut *Grote Postweg* merupakan proyek infrastruktur besar yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, pada tahun 1808–1811. Tujuan utama pembangunan jalan ini adalah untuk memperkuat pertahanan militer dan memperlancar komunikasi serta pengiriman pos dari Batavia (Jakarta) ke daerah-daerah penting di Pulau Jawa, khususnya ke Semarang, Surabaya, hingga Panarukan.<sup>106</sup> Di daerah Buitenzorg, Jalan Raya Pos dibangun sebagai bagian dari jalur strategis tersebut. Posisi Buitenzorg yang berada di antara Batavia dan wilayah pedalaman Jawa Barat membuat kota ini menjadi titik transit penting dalam sistem komunikasi kolonial.

Pada masa kolonial, jalan-jalan utama di Buitenzorg seperti *Grote Postweg* (kini Jalan Juanda), *Bataviaweg* (Jalan Ahmad Yani), *J.P. Coen Weg* (Jalan

---

<sup>106</sup> Hafid Rofi Pradana, “*De Grote Postweg: Kontribusi Daendels dalam Pembangunan Jalan Raya di Tanah Jawa*,” Kompasiana, 8 November 2022.

Pangrango), *Van den Burg Stirum* (Jalan Otista), dan *Handle Straat* (Jalan Suryakencana) berfungsi sebagai sarana mobilitas pemerintahan kolonial Belanda. Jalan *Grote Postweg* dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sebagai bagian dari strategi militer dan administrasi yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Di Buitenzorg, jalan ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan kolonial dan penghubung antara kawasan elit, istana, serta Kebun Raya. Jalan-jalan lain juga berperan dalam struktur kolonial: *Bataviaweg* menghubungkan Buitenzorg dengan pusat kekuasaan di Batavia; *Handle Straat* menjadi pusat perdagangan komunitas Tionghoa; sementara *Van den Burg Stirum* dan *J.P. Coen Weg* melayani kepentingan logistik dan pemukiman elit.

Jalan-jalan ini mencerminkan bentuk tata kota kolonial yang bersifat segregatif dan hierarkis, di mana penguasaan atas ruang sangat dipengaruhi oleh status sosial dan etnis. Masyarakat bumiputra memiliki akses terbatas, sementara kawasan-kawasan tersebut dikembangkan untuk menunjang kenyamanan dan efisiensi aktivitas kolonial Belanda. Seiring dengan penerapan *Politik Etis* oleh pemerintah kolonial di Buitenzorg tahun 1905, sejalan dengan perluasan peran penduduk bumiputra dalam pendidikan, ekonomi, dan administrasi, akses terhadap ruang-ruang kota termasuk jalan-jalan utama menjadi lebih terbuka. Transportasi umum seperti trem dan delman mulai beroperasi secara luas, menghubungkan berbagai kawasan kota dan mempercepat interaksi sosial ekonomi antara masyarakat lokal, Tionghoa, dan kelompok Eropa.

Penggunaan jalan tidak lagi terbatas pada kepentingan kolonial, tetapi mulai melayani kebutuhan masyarakat luas. Jalan Suryakencana (dulu *Handle Straat*) berkembang menjadi pusat ekonomi lokal yang dinamis; Jalan Ahmad Yani dan Otista mulai dipadati aktivitas penduduk dari berbagai latar belakang sosial. Proses ini menjadi awal dari transformasi jalan sebagai ruang publik yang lebih inklusif. Ruang public menurut Habermas adalah arena tempat warga negara dapat berdiskusi, menyuarakan kepentingan, dan membentuk opini secara bebas. Dalam konteks Buitenzorg setelah 1905, terbukanya akses jalan utama bagi masyarakat lokal menjadi langkah awal terbentuknya ruang publik. Meski belum sepenuhnya setara karena struktur kolonial tetap eksis, interaksi antar kelompok mulai terjadi di

ruang-ruang jalan, pasar, dan transportasi umum. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang yang dulunya hanya digunakan untuk mobilitas elit kolonial, mulai diisi oleh warga biasa untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Ruang publik dalam pandangan Habermas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sebagai medium komunikasi yang rasional dan terbuka. Jalan-jalan yang sebelumnya simbol dominasi kini menjadi arena dengan warga yang dapat terlibat dalam kehidupan kota, membentuk opini, dan mengekspresikan identitas mereka secara terbuka.

Edward Relph memandang ruang sebagai entitas yang memiliki makna eksistensial, yang dibentuk oleh pengalaman dan keterikatan manusia terhadap tempat. Dalam konteks Buitenzorg, transformasi jalan-jalan kolonial menunjukkan perubahan makna ruang yang signifikan. Ketika jalan-jalan tersebut mulai digunakan secara luas oleh masyarakat bumiputra dan kelompok lain, maka pengalaman kolektif mulai menciptakan identitas baru atas ruang kota. Relph menekankan bahwa ruang menjadi *place* ketika manusia mengisi dan memberi makna melalui interaksi sosial dan emosional. Ruas-ruas seperti Suryakencana, Otista, dan Juanda tidak lagi sekadar jalur transportasi kolonial, melainkan tempat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Proses ini memperlihatkan bagaimana ruang kota kolonial mengalami *reappropriation*, atau penaklukan kembali oleh warga lokal secara sosial dan kultural.

Berikut ini adalah tabel pemanfaatan ruang publik di kota bogor, sebagai berikut:

Tabel 2 Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Bogor

| No | Ruang publik            | Tahun Dimanfaatkan | Fungsi                                                                                                                     |
|----|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 's Lands Plantentuin    | 1910               | Tempat pariwisata, konservasi dan penelitian                                                                               |
| 2. | Van Imhoff Plein        | 1917               | Tempat bersosialisasi, berjalan-jalan, berkumpul dan bersantai bersama keluarga                                            |
| 3. | Wilhelmina Park         | 1916               | Tempat pertunjukan musik militer dan pusat hiburan                                                                         |
| 4. | Station te Buitenzorg   | 1909               | Pusat distribusi komoditas penting seperti kopi, teh, dan karet dari Priangan Barat.                                       |
| 5. | Societeit te Buitenzorg | 1911               | Tempat pertunjukan dan pertemuan elite kolonial, termasuk pertunjukan seniman kabaret, pusat acara malam dan pesta formal. |

|     |                               |      |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Pasar Baroe                   | 1908 | Pusat ekonomi yang mempertemukan berbagai kelompok etnis dan budaya pada                                                                                                        |
| 7.  | Bibliotheca Bogoriensis       | 1911 | Pusat koordinasi bagi perpustakaan-perpustakaan lembaga yang berada di bawah Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan, baik yang berada di Buitenzorg maupun di Batavia |
| 8.  | Kedung Keresidenan Buitenzorg | 1908 | Tempat tinggal asisten Residen                                                                                                                                                  |
| 9.  | Kantor pos                    | 1908 | Kantor pos dimanfaatkan sebagai jaringan komunikasi global                                                                                                                      |
| 10. | Sarana Ibadah                 | 1908 | Dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan pertemuan kehidupan keagamaan masyarakat.                                                                                                |
| 11. | Bioskop                       | 1920 | Medium hiburan masyarakat                                                                                                                                                       |
| 12. | Jalan Raya                    | 1908 | Tempat mobilisasi masyarakat                                                                                                                                                    |